



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2023**

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022

BerAKHLAK # **bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

Kontak kami : _____

 +62 811-5741-414

 Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu
Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

 dukcapil@kalbarprov.go.id

 <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>





Sambutan Gubernur Kalimantan Barat

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya maka buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan. Berdasarkan Pasal 6 huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur dengan kewenangan meliputi “Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri”.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 83 Ayat (1) “Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”. Dari data kependudukan Provinsi Kalimantan Barat dan data dukung dari Lembaga/Instansi terkait, maka disusunlah profil perkembangan kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022.

Demikian, diharapkan profil perkembangan kependudukan yang disusun ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan program pembangunan sebagai visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah”.

Pontianak, Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

H. SUTARMIDJI, SH, M.HUM



Kata Pengantar

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunianya, maka penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Profil perkembangan kependudukan ini merupakan kondisi kependudukan Provinsi Kalimantan Barat yang dihasilkan dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di 12 (dua belas) Kabupaten dan 2 (dua) Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu juga untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun profil perkembangan kependudukan yang dilaksanakan setiap tahun.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran serta masukan, sehingga buku profil perkembangan kependudukan tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat ini dapat terselesaikan, semoga dapat memberikan gambaran kependudukan untuk dipergunakan sebagai sumber data bagi semua stakeholder dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan secara umum di Provinsi Kalimantan Barat.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 masih terdapat kekurangan dan kelemahan, maka kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran untuk perbaikan penyusunan pada waktu yang akan datang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 198903 1 004

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan	4
BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	14
A. Letak Geografis Daerah	15
B. Kondisi Demografis Daerah	18
C. Gambaran Ekonomi Daerah.....	18
D. Potensi Daerah.....	23
1. Pendidikan.....	23
2. Pertanian	24
3. Perkebunan.....	26
4. Kelautan dan Perikanan	29
5. Budaya.....	31
a) Bahasa	31
b) Rumah Adat	32
c) Pakaian Adat	32
d) Senjata Tradisional.....	32
e) Tari Tradisional.....	32
f) Alat Musik Tradisional	33
g) Ritual Tradisional.....	33
h) Kerajinan Tangan	33
6. Pariwisata	34
7. Perdagangan	35
8. Industri dan Perdagangan.....	37
9. Pelabuhan	37

BAB III SUMBER DATA	40
A. Data Registrasi	40
B. Data Non Registrasi.....	40
C. Data Lintas Sektor Terkait.....	40
BAB IV PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN	41
A. Kuantitas Penduduk.....	41
1. Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	41
a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	41
b) Kepadatan Penduduk.....	42
c) Laju Pertumbuhan Penduduk.....	43
2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi.....	44
a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin ..	44
1) Rasio Jenis Kelamin	45
2) Piramida Penduduk.....	47
3) Rasio Ketergantungan	49
b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin.....	51
1) Angka Perkawinan Kasar.....	52
2) Angka Perkawinan Umum	53
3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur	54
4) Rata-Rata Umur Kawin Pertama.....	55
5) Angka Perceraian Kasar	56
6) Angka Perceraian Umum.....	57
3. Keluarga.....	57
a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	57
b) Hubungan Dengan Kepala Keluarga	58
c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur.....	58
d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin	60
f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan	61
g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan.....	62
4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial	62
a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	62
b) Jumlah Penduduk Menurut Agama	63
c) Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan	64

5. Kelahiran.....	65
a) Jumlah Kelahiran.....	65
b) Angka Kelahiran Kasar	66
6. Kematian.....	66
a) Jumlah Kematian	66
b) Angka Kematian Kasar	67
B. Kualitas Penduduk.....	68
1. Kesehatan.....	68
a) Kelahiran.....	68
1) Angka Kelahiran Menurut Umur	68
2) Angka Kelahiran Total	70
3) Rasio Anak Perempuan	71
b) Kematian.....	71
1) Angka Kematian Bayi	72
2) Angka Kematian Neonatal	73
3) Angka Kematian Post Neonatal	75
4) Angka Kematian Anak dan Balita	76
5) Angka Kematian Ibu.....	77
2. Pendidikan.....	79
a) Angka Melek Huruf	79
b) Angka Partisipasi Kasar	80
c) Angka Partisipasi Murni.....	82
d) Angka Putus Sekolah	84
3. Ekonomi.....	84
a) Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja	84
1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	84
2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur.....	86
a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	87
b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	88
c. Pengangguran Terbuka.....	92
4. Sosial	95
a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.....	95
b) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	97
c) Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan.....	99

C. Mobilitas Penduduk	100
1. Mobilitas Permanen.....	100
a) Migrasi Masuk	100
b) Migrasi Keluar.....	101
c) Migrasi Neto	102
d) Migrasi Bruto.....	102
2. Mobilitas Non Permanen	103
3. Urbanisasi.....	103
a) Persentase Penduduk Kota.....	103
b) Rasio Kota dan Desa.....	104
BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN	105
A. Kepemilikan Kartu Keluarga.....	105
B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk	106
C. Kepemilikan Akta	108
1. Akta Kelahiran	108
2. Akta Perkawinan	109
3. Akta Perceraian.....	110
4. Akta Kematian.....	111
5. Akta Pengakuan Anak.....	112
D. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar.....	113
BAB VI PENUTUP	114

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat	41
Tabel 4.2	Persebaran Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.....	42
Tabel 4.3	Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat.....	43
Tabel 4.4	Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur Di Provinsi Kalimantan Barat	45
Tabel 4.5	Rasio Jenis Kelamin Per Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.....	46
Tabel 4.6	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4.7	Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua	50
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan.....	52
Tabel 4.9	Angka Perkawinan Kasar	53
Tabel 4.10	Angka Perkawinan Umum.....	54
Tabel 4.11	Angka Perkawinan Kelompok Umur.....	55
Tabel 4.12	Angka Perceraian Kasar.....	56
Tabel 4.13	Angka Perceraian Umum	57
Tabel 4.14	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	58
Tabel 4.15	Status Hubungan dengan Kepala Keluarga	59
Tabel 4.16	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur.....	59
Tabel 4.17	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 4.18	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin.....	61
Tabel 4.19	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan.....	61
Tabel 4.20	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan	62
Tabel 4.21	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....	63
Tabel 4.22	Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	63
Tabel 4.23	Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan.....	64
Tabel 4.24	Angka Kelahiran	65
Tabel 4.25	Angka Kelahiran Kasar	66
Tabel 4.26	Jumlah Kematian.....	66
Tabel 4.27	Angka Kematian Kasar	67
Tabel 4.28	Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR)	69
Tabel 4.29	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	70
Tabel 4.30	Rasio Anak Perempuan.....	71
Tabel 4.31	bayi Lahir Mati Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.....	72
Tabel 4.32	angka Kematian Neonatal/NNDR Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	73

Tabel 4.33	Penyebab Kematian Neonatal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	74
Tabel 4.34	Angka Kematian Post Neo Natal	75
Tabel 4.35	Angka Kematian Balita	77
Tabel 4.36	Kematian Ibu/Maternal Mortality Provinsi Kalimantan Barat	78
Tabel 4.37	Angka Partisipasi Kasar / Gross Enrollment Ratio Tahun 2022	80
Tabel 4.38	APK SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	81
Tabel 4.39	APK SMP-SMA Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	81
Tabel 4.40	APM SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	82
Tabel 4.41	APM SMP-SMA Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022	83
Tabel 4.42	Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio Tahun 2022	84
Tabel 4.43	Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur	85
Tabel 4.44	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota	85
Tabel 4.45	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	87
Tabel 4.46	Proporsi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan	88
Tabel 4.47	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	88
Tabel 4.48	Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan	92
Tabel 4.49	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Barat	93
Tabel 4.50	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	94
Tabel 4.51	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	95
Tabel 4.52	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	97
Tabel 4.53	Angka Kecacatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	98
Tabel 4.54	Jumlah Peserta PBI Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022	99
Tabel 4.55	Angka Migrasi Masuk	101
Tabel 4.56	Angka Migrasi Keluar	101
Tabel 4.57	Angka Migrasi Neto	102
Tabel 5.1	Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan barat	106
Tabel 5.2	Persentase Penduduk Wajib KTP-el dan Data Perekaman KTP-el Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	107
Tabel 5.3	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	109
Tabel 5.4	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	110
Tabel 5.5	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	111
Tabel 5.6	Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	112

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021 - 2022.....	44
Grafik 4.2	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kalimantan Barat.....	47
Grafik 4.3	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	48
Grafik 4.4	Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pelayanan publik dewasa ini, perlu memperhatikan faktor kependudukan sebagai subjek dan objek dan penataan sistem administrasi kependudukan secara nasional. Untuk melakukan pembangunan diperlukan suatu konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variabel agar tujuan dari pembangunan tersebut berhasil. Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang memperhatikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang tidak memperhatikan pembangunan kependudukan dapat merugikan setiap keuntungan ekonomi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Upaya mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung adanya upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk dan peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan.

Disadari data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, dan evaluasi hasil-

hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun pihak lain termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, ketersediaan data kependudukan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan. Dengan semakin pesatnya kemajuan Teknologi dan Informasi, perlunya pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota adalah data kependudukan yang dihasilkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi kependudukan perlu disusun Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan berisi gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan di suatu wilayah (provinsi dan kabupaten/kota). Penyusunan profil perkembangan kependudukan di kabupaten/kota disusun berdasarkan data registrasi dan data dari lintas sektor, dimana data registrasi diperoleh dari hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan sedangkan data dari lintas sektor diperoleh dari sektor lain yang terkait.

Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 meliputi data yang berhubungan dengan variabel kuantitas penduduk, variable kualitas penduduk dan variabel mobilitas penduduk dengan kerangka penyusunan profil perkembangan kependudukan ini mencakup 5 hal pokok yaitu :

1. Menyajikan perkembangan profil secara kuantitatif sehingga tampak jelas apa yang sudah berlangsung, kondisi terakhir dan apa yang diproyeksikan di kemudian hari;
2. Mengidentifikasi kelompok atau segmen kependudukan yang membutuhkan perhatian khusus dan upaya-upaya yang diperlukan untuk penanganannya sehingga menjadi berkualitas;
3. Dari point 1 dan 2 teridentifikasi potensi penduduk yang dapat dijadikan asset pembangunan daerah dan nasional;
4. Mengkoordinasikan, melakukan bimbingan teknis dengan instansi terkait untuk memperoleh kesepakatan dan pemahaman dalam penyusunan dan pemanfaatannya;
5. Mendorong percepatan terwujudnya database penduduk dan analisa untuk kebijakan pembangunan daerah.

B. Tujuan

Penyusunan profil perkembangan kependudukan bertujuan sebagai acuan bagi instansi/lembaga pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan pembangunan.

C. Ruang Lingkup

1. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk;
2. Data kualitatif yang berkaitan dengan pengembangan kualitas penduduk; dan

3. Data kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan pengarahannya mobilitas penduduk.

D. Pengertian Umum Terhadap Istilah Yang Digunakan Dalam Profil Perkembangan Kependudukan

1. *Penduduk* adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. *Administrasi Kependudukan* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
3. *Data Kependudukan* adalah data perorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. *Demografi* adalah Ilmu yang mempelajari persoalan dan keadaan tentang perubahan penduduk dan kependudukan terutama yang berkaitan dengan komponen-komponen kelahiran, kematian, migrasi/mobilitas penduduk. Termasuk urbanisasi yang selanjutnya menghasilkan gambaran umum masalah atau komposisi penduduk, baik menurut usia jenis kelamin, pekerjaan lokasi tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

5. *Kuantitas Penduduk* adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992);
6. *Kualitas Penduduk* adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
7. *Mobilitas Penduduk* adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas administrasi Daerah Tingkat II (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992);
8. *Profil Perkembangan Penduduk* adalah kumpulan data dan informasi tentang perkembangan kependudukan dalam bentuk tertulis, yang mencakup segala kegiatan yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang meliputi kuantitas, kualitas dan mobilitas yang mempunyai pengaruh terhadap pembangunan dan lingkungan hidup;
9. *Peristiwa Kependudukan* adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013);

10. *Peristiwa Penting* adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);
11. *Kematian atau mortalitas menurut WHO* adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Biro Pusat Statistik);
12. *Ratio Jenis Kelamin* adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan jenis kelamin antara banyaknya penduduk laki-laki dan penduduk perempuan disuatu daerah pada waktu tertentu;
13. *Perkembangan Kependudukan* adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
14. *Mobilitas penduduk permanen (migrasi)* adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
15. *Mobilitas penduduk non permanen (circucaltion/sirkuler)* adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak

menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif. Mobilitas penduduk non permanen dibagi menjadi dua yaitu ulang alik (*commuting*) dan menginap/mondok.

16. *Penduduk musiman* adalah merupakan salah satu jenis mobilitas penduduk non permanen yang bekerja tidak pada daerah domisilinya dan menetap dalam kurun waktu lebih dari satu hari tetapi kurang dari satu tahun dan dilakukan secara berulang;
17. *Mobilitas penduduk ulang-alik (commuting)* adalah gerak penduduk dari daerah asal ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembalike daerah asal pada hari yang sama;
18. *Migrasi kembali (return migration)* adalah banyaknya penduduk yang pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang sama dengan tempat lahir dan pernah bertempat tinggal di daerah yang berbeda;
19. *Migrasi semasa hidup (life time migration)* adalah bentuk migrasi dimana pada waktu diadakan pendataan tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat kelahirannya;
20. *Migrasi risen (recent migration)* adalah bentuk migrasi melewati batas wilayah administrasi (desa / kecamatan / kabupaten / provinsi) dimana pada waktu diadakan pendataan bertempat tinggal di daerah yang berbeda dengan tempat tinggal lima tahun yang lalu.
21. *Transmigrasi* adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap

di wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi.

22. *Urbanisasi* adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan atau proses perubahan suatu daerah perdesaan menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.
23. *Penduduk Usia Kerja* (Produktif) adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun.
24. *Angka Partisipasi Angkatan Kerja* adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
25. *Pengangguran* adalah orang yang termasuk angkatan kerja, namun pada saat pendataan/survey atau sensus tidak bekerja dan sedang mencari kerja.
26. *Angka Pengangguran* adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.
27. *Bukan Angkatan Kerja* adalah penduduk usia 15 tahun ke bawah dan penduduk berusia 64 tahun ke atas.
28. *Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR)* Adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (dengan asumsi, Wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan akan mengikuti pola fertilitas tersentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut usia.
29. *Angka kelahiran Kasar atau Crude Birth Rate (CBR)* adalah

Banyaknya Kelahiran perseribu penduduk dalam suatu periode waktu tertentu biasanya satu tahun. Angka ini diperoleh dengan membagi jumlah kelahiran yang terjadi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

30. *Angka Kelahiran menurut kelompok usia atau Age Specific Fertility Rate (ASFR)* adalah banyaknya kelahiran tiap seribu wanita ada kelompok usia tertentu.

31. *Angka Kelahiran Umum atau General Fertility Rate (GFR)* adalah angka untuk menggambarkan banyaknya jumlah kelahiran setiap 1000 wanita yang berusia 15 – 49 tahun pada suatu periode tertentu.

32. *Lahir hidup* adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.

33. *Lahir mati* adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berusia paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.

34. *Angka Kematian Bayi Baru Lahir* adalah banyaknya kematian baru lahir, usia kurang dari satu bulan (0-28) hari pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

35. *Angka Kematian Bayi Lepas Baru Lahir* adalah banyaknya kematian bayi lepas baru lahir (usia 1- 11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.

36. *Angka Kematian Bayi/IMR* adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama.
37. *Childhood Mortality Rate (CMR)* adalah jumlah kematian anak berusia 1-4 tahun (balita) selama satu tahun per 1.000 anak usia yang sama pada pertengahan tahun.
38. *Angka Kematian Ibu/MMR* adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan per 100.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya.
39. *Angka Kematian Berdasarkan Kelompok Usia atau Age Specifik Deat Rate (ASDR)* adalah jumlah kematian pada kelompok usia tertentu dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun pada kelompok usia yang sama.
40. *Angka Kematian Kasar* atau *Crude Death Rate (CDR)* adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk.
41. *Pengeluaran untuk makanan* adalah proporsi pengeluaran yang dipergunakan untuk mengkonsumsi makanan dibandingkan dengan total pengeluaran (makanan dan bukan makanan).
42. *Angka Partisipasi Murni/APM* adalah presentase jumlah peserta didik SD usia 7-12 tahun, jumlah peserta didik SLTP usia 13-15 tahun, jumlah peserta didik SLTA usia 16-18 tahun dan jumlah peserta didik PTN/PTS usia 19-24 tahun dibagi

jumlah penduduk kelompok usia dari masing-masing jenjang pendidikan.

43. *Angka Partisipasi Kasar /APK* adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
44. *Gross Migration Atau Migrasi Brutto* adalah jumlah migrasi yang masuk ditambah dengan migrasi keluar yang menunjukkan banyaknya kejadian perpindahan.
45. *Human Development Index (HDI) atau Indek Pembangunan Manusia/IPM* adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mencakup tiga aspek yaitu : pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan yang ditunjuk dengan tingkat pengeluaran untuk konsumsi per tahun.
46. *Migrasi* adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi international).
47. *Mortalitas Atau Kematian* adalah peristiwa hilangnya tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup terjadi. Yang dimaksud dengan tanda-tanda kehidupan misalnya: jantung berdenyut, bergerak dan sebagainya. Dalam hal ini kematian hanya dapat terjadi apabila didahului oleh kelahiran hidup.
48. *Produk Domestik Bruto /PDB* adalah gambaran kasar

tentang tingkat pendapatan negara sebagai hasil penjualan berbagai produksi lokal, jasa dan investasi di banding pengeluaran dalam jangka waktu tertentu, biasanya untuk satu tahun.

49. *Piramida Penduduk* adalah komposisi usia dan jenis kelamin penduduk secara grafis yang digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dalam hal ini piramida penduduk dalam suatu negara/wilayah dapat dibedakan atas tiga ciri, yaitu ekstensif/extensive (sebagian besar penduduk berusia muda). Konstruktif/constructive (sebagian kecil penduduk berada dalam kelompok usia muda dan stasioner/stationary (banyaknya penduduk dalam setiap usia hampir sama dan mengecil pada usia tua. Kecuali pada usia tertentu.

50. *Proyeksi Penduduk* adalah perkiraan jumlah penduduk dimasa mendatang berdasarkan asumsi asumsi mengenai arah perkembangan mortalitas dan fertilitas di masa datang. Untuk membuat proyeksi penduduk (tanpa migrasi), dibutuhkan data (1) distribusi penduduk menurut usia dan jenis kelamin yang telah dirapikan, (2) rasio penduduk yang masih hidup menurut usia, (3) perkiraan tingkat fertilitas menurut usia, (4) rasio jenis kelamin pada waktu lahir.

51. *Rasio/Beban Ketergantungan Atau dependency ratio* adalah rasio antara banyaknya penduduk usia 0 - 14 tahun dan banyaknya penduduk usia 65 tahun ke atas dengan banyaknya penduduk usia kerja (berusia 15 - 64 tahun).

52. *Total Migrasion Atau migrasi total* adalah seluruh kejadian migrasi yang mencakup migrasi semasa hidup (*life time migration*) dan migrasi pulang (*return migration*).

BAB II

GAMBARAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

A. Letak Geografis Daerah

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu dari 38 provinsi yang ada di Indonesia dengan luas wilayah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau adalah 147.037,037 Km² atau sekitar 7,77% dari luas Indonesia (1.892.410,091).

Dilihat dari besarnya wilayah, maka Kalimantan Barat termasuk provinsi terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Tengah (153.443,908 km²) sedangkan ketiga adalah Kalimantan Timur (126.981,279 km²). Dilihat dari luas menurut kabupaten/kota, maka yang terbesar adalah Kabupaten Kapuas Hulu (31.318,246) dan Kabupaten Ketapang (30.018,676), sedangkan sisanya tersebar pada 12 (dua belas) kabupaten/kota lainnya.

Wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat beribukota di Pontianak yang terdiri dari 14 (empat belas) wilayah kabupaten dan kota, dengan batas-batas:

- 1) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata dan Laut Natuna;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Serawak dan Provinsi Kalimantan Timur;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
- 4) Sebelah utara berbatasan dengan Negeri Serawak/Malaysia dan Kalimantan Timur.

Kalimantan Barat secara umum merupakan dataran rendah dan mempunyai ratusan aliran sungai yang aman untuk digunakan berlayar. Selain itu, wilayah ini juga sedikit berbukit dari Barat ke Timur sepanjang Lembah Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata. Sebagian daerah

daratan ini berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan ini juga diapit oleh dua jajaran pegunungan yaitu, Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Daerah Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah yang dapat dijuluki provinsi “Seribu Sungai”. Julukan ini selaras dengan kondisi geografis yang mempunyai ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat sering dilayari. Beberapa sungai besar sampai saat ini masih merupakan urat nadi dan jalur utama untuk angkutan daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah dapat menjangkau sebagian besar kecamatan. Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut, akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Riau.

Sungai besar utama adalah Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia (1.086 km), yang mana sepanjang 942 km dapat dilayari. Sungai-sungai besar lainnya antara lain Sungai Melawi (dapat dilayari 471 km), Sungai Sambas (233 km), Sungai Sekayam (221 km), Sungai Pawan (197 km), Sungai Ketungau (186 km), Sungai Landak (178 km), Sungai Jelai (135 km), Sungai Kendawangan (128 km), Sungai Sekadau (117 km), dan lainnya.

Jika sungai-sungai sangat menonjol jumlahnya di Kalimantan Barat maka sebaliknya yang terjadi dengan danau. Dari danau-danau yang ada hanya dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dan Danau Luar I yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Danau Sentarum mempunyai luas 117.500 hektar yang kadang-kadang nyaris kering di musim kemarau serta Danau Luar I yang mempunyai luas

sekitar 5.400 hektar. Kedua danau ini mempunyai potensi yang baik sebagai objek wisata.

Dipengaruhi oleh dataran rendah yang amat luas maka ketinggian gunung-gunung relatif rendah serta non aktif. Gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Serawai, Kab. Sintang yang mempunyai ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut, jauh lebih rendah dibanding Gunung Semeru (Jatim, 3.676 meter) atau Gunung Kerinci (Jambi, 3.805 meter).

Gunung Lawit yang berlokasi di Kapuas Hulu, Kec. Embaloh Hulu dan lebih dahulu dikenal di Kalimantan Barat ternyata hanya menempati tertinggi ketiga karena mempunyai tinggi 1.767 meter, sedangkan tertinggi kedua adalah Gunung Batusambung (Kec. Ambalau) dengan ketinggian mencapai 1.770 meter.

Walaupun sebagian kecil wilayah Kalimantan Barat merupakan perairan laut akan tetapi Kalimantan Barat memiliki puluhan pulau besar dan kecil (sebagian tidak berpenghuni) yang tersebar sepanjang Selat Karimata dan Laut Natuna yang berbatasan dengan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera.

Pulau-pulau besarnya seperti Pulau Karimata, Pulau Maya dan Pulau Panebangan di Kabupaten Kayong Utara, serta Pulau Bawal dan Pulau Gelam di perairan Selat Karimata, Kabupaten Ketapang. Pulau besar lainnya antara lain adalah Pulau Laut, Pulau Betangin Tengah, Pulau Butung, Pulau Nyamuk dan Pulau Karunia di Kabupaten Pontianak. Sebagian kepulauan ini, terutama di wilayah Kabupaten Ketapang merupakan Taman Nasional serta wilayah perlindungan atau konservasi.

Dilihat dari tekstur tanahnya maka, sebagian besar daerah Kalimantan Barat terdiri dari jenis tanah PMK (podsolet merah kuning), yang meliputi areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta hektar. Berikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial

sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, namun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai.

Wilayah Kalimantan Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing yaitu dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat merupakan satu-satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari Pontianak – Entikong – Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang sekitar 400 km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai delapan jam perjalanan.

Jalur transportasi udara antar kabupaten/kota dan antar provinsi di Pulau Kalimantan dan di luar Pulau Kalimantan sudah tersambung dengan moda transportasi pesawat udara, sedangkan transportasi darat antar kabupaten/kota juga sudah tersambung melalui jalan darat. Bahkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan sudah tersambung melalui Jalan Trans Kalimantan, begitu juga transportasi darat menuju Negara tetangga Malaysia (Sarawak) dan Brunai Darussalam sudah dapat menggunakan transportasi darat. Selain transportasi darat dan udara, moda transportasi laut juga sering digunakan untuk menyeberang ke Pulau Natuna, Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2008' LU serta 3002' LS serta di antara 108030' BT dan 114010' BT pada peta bumi. Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka daerah Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Karena pengaruh letak ini pula maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

B. Kondisi Demografis Daerah

Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, berjumlah 5.497.151 jiwa, dimana 2.826.287 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.670.864 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dengan luas wilayah 147.037 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru 37 jiwa per kilometer persegi dengan laju pertumbuhan penduduk 0,55%.

Menurut kelompok umur, penduduk Kalimantan Barat tahun 2008 – 2012 masih membentuk piramida dengan kelompok umur usia anak dan usia produktif relatif besar, sedangkan berdasarkan lapangan usaha, penduduk yang bekerja di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2008–2012 masih didominasi penduduk yang bekerja disektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

C. Gambaran Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat pada Triwulan IV-2022 mengindikasikan keberhasilan pemulihan ekonomi, yaitu tumbuh sebesar 5,01% (y-o-y), sama seperti angka pertumbuhan ekonomi Nasional. Secara kumulatif, ekonomi Kalbar Tahun 2022 dibanding 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,07% (c-to-c), angka ini lebih tinggi dibandingkan regional Kalimantan dengan pertumbuhan sebesar 4,94%. Meningkatnya rata-rata produksi komoditas unggulan Triwulan IV-2022 dibandingkan dengan Triwulan III-2022 membuat ekonomi tumbuh 1,81% (q-to-q).

Inflasi Kalbar secara year on year mengalami penurunan sebesar 5,43% sejalan dengan prakiraan Bank Indonesia. Inflasi volatile food cenderung rendah, sementara itu administered price atau biaya komoditi yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi penyebab cukup tingginya angka inflasi Kalimantan Barat seperti angkutan udara, harga rokok, BBM, dan listrik. Upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal dan Bank Indonesia sebagai pemilik kewenangan moneter dalam mewaspadaikan lonjakan inflasi telah dilakukan.

Belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN telah dikucurkan sebanyak Rp34,1juta atau 0,32% dari dana yang dianggarkan. Di sisi moneter, suku bunga/BI-rate pun tidak bergerak pada besaran 5,75% per Februari 2023. Selain itu, upaya penanggulangan inflasi juga telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Desa (OPD) di Pemkot Pontianak seperti Disperindagkop yang mulai memetakan kebutuhan dan harga pangan di tengah masyarakat sehingga saat Ramadhan telah stabil. Hal itu bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan agar tidak menahan barang.

Berbagai upaya lain yang dapat dilakukan, diantaranya mempercepat penyaluran belanja berupa belanja bantuan sosial, mendorong daerah-daerah yang kurang mampu menekan laju inflasi untuk segera mengintervensi, dan memonitor melalui TPID secara regular/mingguan (termasuk Bank Indonesia didalamnya) agar harga pangan terkendali terutama menyambut bulan Ramadhan.

Realisasi pendapatan dalam APBN Regional Kalbar menunjukkan pencapaian sebesar Rp1.879,62 miliar atau sebesar 17,62%, yang didominasi oleh PPN dan PPh. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 28 Februari 2023 sebesar Rp3.383,30 miliar atau sebesar 9,52%, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp869,65 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp2.513,65 miliar. Dengan kondisi ini, maka untuk sementara terdapat defisit regional sebesar Rp 1.503,68 miliar. Pada realisasi APBD Kalbar sampai dengan 28 Februari 2023, pendapatan daerah menunjukkan pencapaian sebesar Rp2.104,71 miliar atau sebesar 8,10%. Pada sisi belanja, realisasi s.d. 28 Februari 2023 sebesar Rp1.286,42 miliar atau sebesar 4,78%. Dengan kondisi ini, maka terdapat surplus sebesar Rp818,30 miliar, serta dengan net pembiayaan daerah sebesar negatif Rp108,54 miliar dan SiLPA sebesar Rp709,75 miliar.

TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat s.d Februari 2023 berdasarkan data pencatatan Pemda adalah sebesar Rp1.491,62 miliar atau 70,87% dari total pendapatan APBD, sementara data tercatat di OMSPAN adalah sebesar Rp2.513,65 miliar, dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalimantan Barat.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai 80,74 miliar untuk 862 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran 17,92 miliar diikuti Kota Pontianak dengan penyaluran 14,99 miliar. Terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental pada tahun 2023 ini, yaitu adanya penegasan pelaksanaan KUR plafon s.d. Rp100 juta tanpa agunan tambahan dan syarat calon penerima KUR tidak pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial.

Jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sampai dengan 28 Februari 2023 mencapai 2.194 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp10,26 miliar. Kota Pontianak menjadi wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 414 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp1,9 miliar diikuti oleh Kabupaten Sanggau, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, dan Kab. Sambas masing- masing sebesar Rp1,3 miliar. Sementara itu belum terdapat penyaluran di wilayah Kabupaten Melawi.

Berdasarkan perhitungan keterkaitan antar sektor di Kalimantan Barat, sektor dengan keterkaitan ke belakang (backward linkage) terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas (1,856) dan keterkaitan ke depan (forward linkage) terbesar yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan (2,099) sehingga menjadi sektor penggerak bagi sektor lainnya. Besarnya nilai pada sektor pengadaan listrik dan gas karena semua sektor memiliki sifat ketergantungan yang tinggi terhadap energi yang menjadi sumber utama

kehidupan manusia modern. Simulasinya adalah adanya jika terjadi peningkatan permintaan akhir (Rp 1 juta) pada sektor pengadaan listrik dan gas, maka sektor ini akan membutuhkan input tambahan dari sektor lainnya termasuk sektor pengadaan listrik dan gas itu sendiri untuk proses produksi/output sektor pengadaan listrik dan gas sebesar Rp 1,856 juta satuan secara langsung dan jika terjadi peningkatan pada permintaan akhir (Rp 1 juta), maka output sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dialokasikan secara langsung pada sektor lainnya atau pada sektor itu sendiri akan meningkat sebesar Rp 2,099 juta.

Dukungan investasi yang bersumber dari PMDN tahun 2022 sebesar Rp 6.414.674,4 juta yang terealisasi pada 2.262 proyek terjadi penurunan investasi PMDN sebesar 59,54 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp10.773,4 miliar yang terealisasi pada 2.173 proyek. Sebagian besar realisasi PMDN berada di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan, kemudian sektor industri makanan, dan sektor pertambangan. 5 (lima) lokasi tujuan investasi tahun 2022, diantaranya Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Ketapang. Sektor utama untuk meningkatkan output/pertumbuhan ekonomi daerah dengan berfokus pada sektor pengadaan listrik dan gas. Sektor utama untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan berfokus pada sektor perdagangan. Sektor utama untuk meningkatkan kesempatan kerja dengan berfokus pada sektor padat karya, seperti konstruksi dan industri pengolahan.

Alokasi APBN dan APBD masih didominasi oleh pelayanan umum dan kebutuhan administrasi pemerintahan, sementara dukungan pemerintah melalui alokasi APBN dan APBD pada sektor unggulan masih rendah. Misalnya, pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, di mana penggunaan output dari sektor ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar sektor lainnya, namun dukungan pemerintah masih sangat

rendah Begitupun, dengan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor pengadaan listrik dan gas, kecuali sektor konstruksi.

Pada harmonisasi Belanja KL dengan TKDD secara umum keberadaan output dari Belanja K/L maupun TKDD (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) telah selaras diantara keduanya. Perbedaan yang terjadi lebih disebabkan karena adanya perbedaan tujuan kegiatan antara program pada Kementerian/Lembaga dan dengan TKDD, sehingga dihasilkan capaian output dengan satuan yang berbeda dan tidak bisa dibandingkan. Namun demikian, secara substansi program-program yang ada di antara keduanya telah selaras dan harmonis.

Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa pada tahun anggaran 2022, namun demikian untuk mengatasi kendala yang dihadapi sinergi dan komunikasi yang intensif telah dilaksanakan oleh KPPN selaku penyalur DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa, BPKAD, Dinas Pemdes dan Dinas Teknis terkait. Semua pihak harus memiliki kesamaan persepsi atas ketentuan penyaluran yang diatur pada peraturan sehingga penyaluran dapat dilakukan secara tepat waktu.

Pada harmonisasi belanja Pusat dan Daerah pada tahun anggaran 2022 dapat ditemukan korelasi/hubungan output antara belanja Pusat dan Belanja Daerah yang mendukung Prioritas Nasional dan Major Project yang telah ditetapkan pada Provinsi Kalimantan Barat. Dari Pagu Anggaran Belanja Pusat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10,7 triliun, Alokasi Belanja Prioritas Nasional pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp2,49 triliun atau 23,27 persen, adapun alokasi belanja Prioritas Nasional terbesar adalah PN 5 sebesar Rp1,5 triliun (60,58%) dan alokasi terendah adalah PN 6 sebesar Rp54,25 miliar (2,18%). Sedangkan dari Pagu Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6,65 triliun, semuanya terpetakan pada Belanja Prioritas Nasional, pagu anggaran

terbesar adalah PN 1 sebesar Rp5,52 triliun (83,13%) dan alokasi terendah adalah PN 6 sebesar Rp277 juta (0,004%).

Terkait hal tersebut, Pemerintah Pusat/Daerah perlu menyelaraskan capaian output dengan satuan yang sama pada setiap kategori sehingga dapat dibandingkan output yang dihasilkan dari Belanja KL maupun TKDD. Pemerintah Daerah melalui instrumen belanja agar menyelaraskan belanja daerah dengan keberadaan infrastruktur prioritas seperti Terminal Kijing, pembangunan smelter dan Kawasan Industri Ketapang serta memanfaatkan keberadaan infrastruktur strategis di daerahnya agar seluruh masyarakat dapat memperoleh dampak ekonomi yang ditimbulkan. Terhadap proyek prioritas yang menggunakan skema pembiayaan swasta, dari sisi fiskal yang bisa dilakukan oleh Dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga diperlukan untuk memperluas akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan kompetensi SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, agar program pembangunan yang dicanangkan pada Kalimantan Barat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

D. Potensi Daerah

1. Pendidikan

Kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan selayaknya semakin tinggi kualitas penduduk tersebut. Indikator kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan juga angka melek huruf (kemampuan membaca dan menulis).

Dalam hal ini, Guru sebagai tokoh sentral dalam dunia pendidikan. Kualitas guru sebagai tenaga pendidik harus selalu ditingkatkan. Selain itu, distribusi penyebaran guru juga harus merata di setiap wilayah. Distribusi guru yang tidak merata akan berdampak pada proses belajar mengajar menjadi kurang efektif sehingga hal ini akan mengurangi

kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan di sektor pendidikan. Salah satu indikator untuk melihat kualitas guru adalah dari pendidikan yang dimiliki. Selanjutnya kekurangan guru juga menjadi masalah yang dapat mengurangi kualitas pendidikan. Kekurangan tenaga guru di Kalimantan Barat sangat parah, tidak hanya terjadi pada sekolah negeri, pada sekolah swasta juga mengalami keterbatasan. Keterbatasan tenaga guru juga terjadi di daerah perkotaan, apalagi pada daerah pedalaman. Selain itu, masih banyak tenaga guru di Kalimantan Barat pada sekolah negeri yang berstatus tenaga honorer.

Walaupun dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, Provinsi Kalimantan Barat masih dapat menunjukkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, banyak prestasi yang diraih oleh siswa-siswi baik di bidang seni maupun pada perlombaan bidang studi. Demikian juga halnya dengan prestasi di tingkat perguruan tinggi, banyak prestasi yang diperoleh pada perlombaan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

2. Pertanian

Luas panen padi pada 2022 mencapai sekitar 272,12 ribu hektar, mengalami peningkatan sebanyak 48,95 ribu hektar atau 21,93 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 223,17 ribu hektar.

Produksi padi pada 2022 sebesar 814,74 ribu ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 102,84 ribu ton GKG atau 14,45 persen dibandingkan 2021 yang sebesar 711,90 ribu ton GKG. Angka Sementara (ASEM) BPS 2022 mencatat angka produksi padi Provinsi Kalbar sudah mencapai 814.743 ton Gabah Kering Giling (GKG) dari luas lahan 272.116 hektare.

"Produktivitas padi di Kalbar dari catatan ASEM BPS 2022 tersebut sebesar 2,994 ton per hektare," ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum di Pontianak, Kamis. Ia

menambahkan dari data yang ada, secara nasional luas panen padi di Kalbar ASEM 2022 menempati urutan ke-11 dari sebelumnya urutan ke-13 berdasarkan Angka Tetap (ATAP) 2021.

"Untuk produksi padi data ASEM 2022 ini menempati urutan ke-13 dari sebelumnya ke-14 dari ATAP 2021. Kenaikan produksi padi Kalbar tersebut tidak terlepas dari meningkatnya luas panen padi sebesar 21,93 persen," kata dia.

Menurut dia, kebutuhan beras di Kalbar rata-rata 533.628 ton per tahun, dengan jumlah penduduk Kalbar 5.466.942 jiwa. Pihaknya terus memaksimalkan budidaya sehingga ketahanan pangan terus hadir di Kalbar.

"Dari data produksi padi yang ada, musim panen selanjutnya dan kebutuhan beras yang ada di tengah resesi dunia dan ancaman krisis pangan, Provinsi Kalbar masih surplus. Kami terus memaksimalkan potensi tanaman pangan terutama beras sehingga pangan utama terus terjaga dan surplus. Dengan begitu masyarakat Provinsi Kalbar tidak perlu khawatir,"ucap dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman, Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Dony Saiful Bahri menjelaskan bahwa dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar, Kabupaten Sambas terus menjadi lumbung pangan. Produksi padinya mendominasi sebanyak 204.204 ton GKG.

"Selanjutnya baru disusul Kabupaten Ketapang sebesar 105.832 ton GKG dan Landak 104.255 ton GKG. Sedangkan untuk produksi terendah di Kota Pontianak hanya 566 ton GKG," ucap dia.

Produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kalimantan Barat mulai mengalami peningkatan. Pada Periode II Maret 2022, Harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit di Kalbar berdasarkan hasil penetapan Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Provinsi Kalbar mencatatkan

harga tertinggi yakni untuk umur 10 – 20 tahun sudah tembus Rp4.000 atau sudah mencapai Rp4.041,45 per kilogram .

Harga sawit terus mengalami tren kenaikan dan untuk periode II Maret 2022 ini merupakan rekor tertinggi untuk TBS sawit dan produk lainnya. Sejak tahun lalu dan awal 2022 ini harga TBS sawit paling tinggi di angka Rp3.000 per kilogram dan kini sudah tembus Rp4.000 per kilogram. Untuk harga CPO atau minyak mentah sawit sendiri periode II Maret 2022 juga tembus di angka Rp 17.049,44 per kilogram. Periode I Maret 2022 sebelumnya hanya Rp15.534,25 per kilogram.

Untuk inti sawit atau PKO juga naik di mana periode sebelumnya Rp12,727,14 dan periode periode II Maret 2022 sudah mencapai Rp13.590,95 per kilogram. Kenaikan harga sawit dipengaruhi beberapa faktor di antara permintaan dalam dan luar negeri meningkat dan jumlah produksi.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Kalbar, YS Marjintan mengatakan bahwa dengan harga sawit naik maka petani semakin bergairah dan pendapatan meningkat. Hal itu mendorong kesejahteraan petani. Bahkan dengan harga semakin baik minat untuk budidaya semakin meningkat pula baik yang ikut dalam program PSR yang dicanangkan pemerintah maupun secara swadaya. Hal itu terbukti meningkatnya permintaan bibit siap edar.

3. Perkebunan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan lahan untuk kebutuhan pengembangan perkebunan berkelanjutan terutama dengan prioritas utama untuk komoditas unggulan Kalbar.

Dalam RTWP Provinsi Kalbar Tahun 2014, sekitar 4,819 juta Hektare dari total APL seluas 6,333 juta Hektare atau 76% telah dialokasikan untuk kebutuhan lahan pengembangan perkebunan berkelanjutan terutama

dengan prioritas utama untuk komoditas unggulan kalbar yaitu Kelapa Sawit, Karet, Kelapa Dalam, Kakao, Lada dan Kopi. Selanjutnya Pemprov Kalbar dengan komitmen dukungannya menerbitkan Pergub Nomor 159 Tahun 2021 Tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Sebagian besar seluas 3,797 Hektare atau 78% dari APL sub sektor Perkebunan telah dicadangkan untuk kebutuhan pengembangan kelapa sawit yang diminati investor maupun perkebunan rakyat dan hingga saat ini tercatat sudah 363 IUP telah diterbitkan oleh para bupati seluruh Kalimantan Barat dengan luasan konsesi izin mencapai 3,272 Hektare atau 86%.

Pembangunan perkebunan saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Dengan semakin ketatnya persaingan menuntut seluruh pihak untuk saling bersinergi demi mencapai produktivitas, efisiensi, dan iklim usaha yang kondusif. Pembangunan perkebunan di Kalimantan Barat dalam pelaksanaannya senantiasa diselaraskan dengan kebijakan pembangunan pertanian secara nasional, di mana program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyusun rencana induk atau masterplan pengembangan kawasan perkebunan dan kajian unit biaya pembangunan komoditas unggulan perkebunan agar berjalan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan rencana induk pengembangan kawasan perkebunan sudah tahap diskusi terfokus yang melibatkan para pihak. Rencana induk ini penting agar pembangunan perkebunan berjalan secara utuh, terpadu dan berkelanjutan, serta fokus pada pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Rencana induk yang ada agar subsektor perkebunan dapat berperan secara optimal dalam pembangunan nasional. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan tentang pengelolaan kawasan yang dirancang dalam bentuk rencana induk pengembangan kawasan berbasis komoditas perkebunan.

Pengembangan kawasan perkebunan untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian RI nomor : 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional. Saat ini sedang dalam proses revisi dan semua provinsi diminta untuk menyampaikan usulan dalam rangka penetapan kawasan nasional komoditas prioritas perkebunan.

Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 159 tahun 2021 bahwa rencana pengembangan komoditi perkebunan di Provinsi Kalbar ditetapkan untuk prioritas pengembangan komoditi unggulan perkebunan seluas 4.765.901 hektare. Komoditi tersebut berupa tanaman kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, lada dan komoditi kopi serta komoditi yang termasuk dalam aneka tanaman seluas 53.757 hektare berupa tanaman cengkeh, kemiri, aren, pinang, tebu, sagu, kapuk dan pala.

Rencana induk pengembangan kawasan perkebunan Provinsi Kalbar ini berisi skenario arah kebijakan dan tujuan program pengembangan kawasan perkebunan lintas sektoral bersifat strategis dengan cakupan wilayah berbasis administrasi kecamatan. Substansi rencana induk mencakup proses dan keluaran perencanaan pengembangan kawasan. Di dalam rencana induk akan mengakomodir inventarisasi potensi kawasan perkebunan di wilayah masing-masing.

Rencana induk pengembangan kawasan perkebunan Provinsi Kalbar dan kajian unit biaya pembangunan komoditas unggulan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kerjasama Dinas Perkebunan

dan Peternakan Provinsi Kalbar dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Kelautan dan Perikanan

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar adalah Provinsi Kalimantan Barat. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut. Komoditas unggulan untuk Provinsi ini adalah ikan mas, nila, lele, bandeng, dan udang vannamei.

Kalimantan Barat secara dimensi kewilayahan terbagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara. Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

Potensi pengembangan budidaya pada Provinsi Kalimantan Barat masih sangat terbuka. Dari lahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan perikanan budidaya hanya sedikit sekali yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat di sana untuk berbudidaya ikan. Hanya

sekitar 1% saja lahan atau sebesar 1587,93 ha yang sudah termanfaatkan dari total 158.793 ha lahan yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya di Provinsi Kalimantan Barat.

Akan tetapi tidak semua Kabupaten dan Kota memiliki potensi perikanan yang baik dan berkembang, Hal ini dikarenakan tidak semua daerah berada di garis pantai maupun diwilayah perairan daratan. Potensi perikanan laut terbesar sendiri berasal dari Kota Singkawang, potensi perikanan payau tetapi masih 2 dalam tahap pengembangan berada pada Kabupaten Kubu Raya dan Kayong Utara, kemudian untuk perikanan tawar hampir setiap Kabupaten memiliki angka produksi perikanan air tawar, hal ini didukung dengan pendirian sarana Balai Benih Ikan di beberapa wilayah pada beberapa Kabupaten.

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya perairan adalah Kota Pontianak. Kota Pontianak dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar yaitu 400 meter. Dengan adanya Sungai Kapuas ini Kota Pontianak memiliki cukup banyak Keramba Jaring Apung (KJA) yang berada di sepanjang aliran sungai, karena sungai ini merupakan salah satu sumber air utama yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya perikanan. Selain itu potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang ada juga sangat mendukung dalam perkembangan kegiatan budidaya.

Selain itu, keadaan lahan di Kalimantan Barat yang banyak rawa dan bergambut merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat perikanan disana, utamanya untuk pengembangan perikanan budidaya dalam bentuk kolam. Komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan pada budidaya kolam antara lain adalah ikan mas, nila, jelawat, lele, toman betutu, patin , gurame dan udang yang galah. Kesemua komoditas ini sangat mudah ditemukan diperairan Kalimantan Barat karena memang

kondisi lahan dan perairannya yang sangat mendukung untuk kelangsungan hidupnya.

Pembangunan kelautan dan perikanan di Kalimantan Barat diarahkan pada optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan, memperluas lapangan kerja, mendukung peningkatan ekspor non migas dan meningkatkan konsumsi hasil perikanan.

Sektor kelautan dan perikanan telah dijadikan salah satu sektor andalan karena perannya yang sangat strategis yaitu sebagai penyedia lapangan kerja, peningkatan pendapatan, sebagai bahan baku industri perikanan serta sebagai penyediaan makanan yang mengandung protein tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kalimantan Barat.

5. Budaya

Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang letaknya di pulau Kalimantan dan Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi. Daerah ini berbatasan langsung dengan Sarawak yang merupakan bagian dari negara Malaysia. Kalimantan Barat mempunyai banyak sungai kecil dan sungai besar. Sungai ini dipakai sebagai jalur utama angkutan atau kendaraan untuk masuk ke pedalaman. Dengan banyaknya sungai ditempat ini, banyak orang menyebutnya sebagai provinsi seribu sungai. Negara Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam suku dan kebudayaan, khususnya provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat mempunyai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki. Berikut ini beberapa keragaman budaya yang berasal dari Kalimantan Barat, diantaranya :

a) Bahasa

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat. Sedangkan untuk bahasa penghubungnya memakai bahasa Melayu Pontianak, Melayu

Sambas dan juga Bahasa Senganan, sesuai dengan wilayah penyebarannya.

b) Rumah Adat

Kalimantan Barat mempunyai rumah adat yang bernama rumah Betang. Bentuk dan ukuran besar rumah Betang ini berbeda-beda. Terdapat rumah Betang yang panjangnya bisa mencapai 150 meter dan lebar hingga 30 meter. Pada umumnya rumah Betang di bangun dalam bentuk panggung, yang memiliki ketinggian tiga sampai lima meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah Betang ini, bertujuan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan.

c) Pakaian Adat

Pakaian adat untuk Kalimantan Barat adalah King Baba dan King Bibige. King Baba untuk laki-laki sedangkan King Bibige untuk perempuan. Pakaian tersebut dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain. Kulit kayu yang dapat digunakan sebagai kain untuk membuat cawat, celana, baju, serta selimut, adalah kayu kapua atau ampuro.

d) Senjata Tradisional

Senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat dinamakan Mandau. Mandau adalah sejenis pedang yang mempunyai keunikan yang terdapat di ukiran dan kekhasannya. Hulunya atau gagangnya terbuat dari tanduk rusa yang diukir, sedangkan besi untuk pedangnya dibuat dari besi yang ditambang sendiri. Besi yang ditambang terdiri dari dua jenis, yaitu Bahtuk Nyan yang terkenal keras dan juga tetapi mudah patah. Dan juga Umat Motihke yang terkenal lentur, beracun dan tidak juga berkarat.

e) Tari Tradisional

Kalimantan Barat mempunyai beberapa tari tradisional. Diantaranya, Tari Monong dan tari Kinyah Uut Danum. Tari Monong adalah tari

penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Penari ini seperti dukun dengan jampi-jampinya. Tarian ini hadir ketika penari sedang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan tari Kinyah Uut merupakan tarian perang yang menunjukkan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh.

f) Alat Musik Tradisional

Kalimantan Barat mempunyai banyak alat musik khas daerah tersebut. Beberapa diantaranya seperti: Sapek-Sapek, gong-gong, dan kollantung. Sapek-sapek adalah alat musik petik tradisional dari Kapuas hulu dari masyarakat Dayak Kayaan Mendalam. GongGong dan Kollantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Gong-Gong dan kollantung merupakan alat musik yang multifungsi. Bisa sebagai mas kawin, sebagai dudukan simbol semangat dalam pernikahan, ataupun sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat.

g) Ritual Tradisional

Ritual tradisional Kalimantan Barat adalah Robo- robo. Robo- robo diadakan pada Rabu terakhir bulan Sapar atau Hijriah sebagai simbol keberkahan. Menurut cerita, ritual ini sebagai bentuk peringatan atau napak tilas kedatangan Pangeran Mas Surya Negara. Pangeran Mas Surya Negara berasal dari Kerajaan Matan atau Martapura ke Kerajaan Mempawah atau Pontianak. Selain itu ritual robo- robo juga digunakan untuk mengenang hari wafatnya Opu Daeng Manambun.

h) Kerajinan Tangan

Masyarakat Kalimantan Barat sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan yang khas dari daerahnya. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang biasa di buat oleh warga yaitu Tikar

lampit yang terbuat dari rotan. Dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas atau pun keranjang.

6. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan nasional dan merupakan salah satu andalan jika dikelola dengan baik karena Kalimantan Barat memiliki 325 destinasi wisata dan lebih banyak wisata alam. Kalbar mempunyai destinasi wisata Temajuk yang sangat luar biasa. Selain itu, di Kabupaten Sambas terdapat Wisata yang terkenal dengan adanya ulama besar Masjidil Haram dan semua peninggalannya di Sambas yang bisa menjadi daya tarik wisatawan yang datang.

Obyek wisata Kalimantan Barat secara garis besar dibedakan menjadi wisata alam dan wisata yang dibuat oleh manusia. Obyek wisata alam berupa pantai, sungai, bukit, air terjun, sedangkan obyek wisata buatan meliputi hasil kerajinan, makanan olahan dan lain-lain.

Upacara adat yang dilakukan oleh berbagai etnis juga menjadi magnet wisatawan berkunjung ke Kalimantan Barat, seperti festival Cap Go Meh, barongsai dan naga di Kota Singkawang, upacara naik dango dan gawai dayak di Kabupaten Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang dan Bengkayang serta lomba sampan di Sambas, robo-robo di Kabupaten Mempawah, dan fenomena alam di garis khatulistiwa di Kota Pontianak.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 24.612 orang melalui berbagai pintu masuk. Kunjungan wisman meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kunjungan wisman periode 2022 hanya 474 orang.

Lima pintu masuk wisman ke Kalbar didominasi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau sebanyak 11.067 orang, PLBN Aruk di Kabupaten Sambas sebanyak 10.806 wisman, PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 2.738 wisman, Bandara Internasional Supadio Pontianak di Kubu Raya sebanyak 1 wisman, sedangkan melalui Jagoi Babang masih kosong. Jumlah kunjungan wisman menurut kebangsaan yang datang ke Kalbar didominasi dari negara tetangga Malaysia sebanyak 17.825 orang.

Wisman dari negara tetangga Malaysia yang berbatasan darat langsung dengan Kalbar mendominasi kunjungan wisatawan ke provinsi ini. Setelah itu baru disusul dari negara anggota ASEAN dan lainnya. Terkait potret Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel berbintang di Kalbar khusus hanya pada April 2023 sebesar 47,30 persen atau turun 2,38 poin dibandingkan TPK Maret 2023 yang tercatat sebesar 49,68 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan TPK April 2022 yang tercatat 41,98 persen, TPK April 2023 mengalami kenaikan sebesar 5,32 poin. TPK tertinggi pada bulan April 2023 tercatat pada hotel bintang empat yang mencapai 61,87 persen, dan tidak ada tamu yang menginap pada hotel bintang satu.

Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Kalbar mencapai 1,82 hari selama April 2023. Relatif mengalami kenaikan sebesar 0,11 hari jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 1,71 hari, sedangkan jika dibandingkan dengan April 2022 yang tercatat sebesar 1,58 hari juga mengalami kenaikan sebesar 0,24 hari.

7. Perdagangan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan di Provinsi Kalbar sepanjang Januari - Desember 2022 surplus mencapai 2.118,21 juta dolar AS. Neraca perdagangan Kalbar 2022 tumbuh positif di

mana nilai ekspor Kalbar lebih banyak dibandingkan impor sehingga surplus.

Untuk nilai ekspor Kalbar sepanjang 2022 sebesar 2.455,34 juta dolar AS. Tahun sebelumnya hanya 1.872,43 juta dolar AS. Perubahan signifikan jumlah ekspor Kalbar dari 2021 ke 2022 di mana ada pertumbuhan sebesar 31,13 persen.

Di lihat dari golongan barang, ekspor Kalbar 2022 didominasi oleh Lemak & Minyak Hewan /Nabati (HS15) sebesar 736,64 juta dolar AS atau memiliki kontribusi 20,42 persen terhadap nilai ekspor. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai ekspor HS15 tersebut pada 2022 ada peningkatan 25,73 persen.

Untuk negara tujuan ekspor yang mendominasi masih ke negara Tiongkok dengan nilai 822,73 juta dolar AS atau dengan kontribusi 30,53 persen. Sementara untuk nilai impor Kalbar pada 2022 sebesar 337,13 juta dolar AS. Angka nilai ekspor tersebut dibandingkan tahun sebelumnya yakni 282,22 juta dolar AS ada peningkatan 19,46 persen.

Dari sisi nilai impor, juga ada peningkatan pada 2022 lalu. Kembali, meski meningkat nilainya jauh lebih kecil dari nilai ekspor. Dari sisi golongan barang, Bahan Bakar Mineral (HS27) mendominasi impor Kalbar sebesar 162,61 juta dolar AS atau memiliki andil sebesar 36,39 persen dari total ekspor 2022.

Sementara dari sisi negara asal impor, dari negara Malaysia mendominasi dengan nilai 163,17 juta dolar AS. Kontribusi negara tersebut memasok ke Kalbar sebesar 43,85 persen. Tahun sebelumnya juga mendominasi dengan nilai 122,08 juta dolar AS. Nah, perubahan dari tahun sebelumnya dengan 2022 itu ada peningkatan impor dari Malaysia sebesar 33,66 persen.

8. Industri dan Perdagangan

Potensi sumber daya mineral di Kalimantan Barat cukup besar, hampir semua jenis galian terdapat di Kalimantan Barat yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada. Beberapa potensi jenis galian atau jenis tambang antara lain radio aktif terdapat di Kabupaten Melawi, Migas di Melawi dan Sintang, sedangkan Logam, Non Logam, Batubara, Batuan tersebar di seluruh kabupaten di Kalimantan Barat.

Provinsi Kalimantan Barat terus mengembangkan sektor industri untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara bidang pertanian dan industri demi memenuhi kebutuhan pokok rakyat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ada tiga jenis kelompok industri yang menjadi tumpuan perkembangan industri di Kalimantan barat, yaitu perusahaan industri pengolahan besar, industri sedang, industri kecil dan mikro berupa industri makanan dan minuman, kayu atau bukan kayu, barang-barang anyaman dari rotan, bambu dan sejenisnya dan lain-lain.

Jenis komoditas sumber daya mineral atau pertambangan yang menjadi unggulan dan sudah dikelola oleh perusahaan antara lain adalah logam seperti Bouksit di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang, Batubara di Sintang, dan jenis batuan yang diolah dan tersebar di seluruh kabupaten. Sedangkan untuk jenis Radioaktif yaitu Uranium telah dikelola oleh Badan usaha Milik Negara LAPAN di Kabupaten Sintang.

9. Pelabuhan

Pelabuhan laut Dwikora Pontianak merupakan pelabuhan yang teramai dan paling sibuk diantara pelabuhan lainnya di Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan bongkar muat barang setiap tahunnya untuk keperluan ekspor dan impor ke beberapa

Negara tujuan, yaitu mencapai sebesar antara 70 persen dan 90 persen dari total bongkar muat di Kalimantan Barat.

Pada Selasa tanggal 9 Agustus 2022, Presiden Republik Indonesia. Ir. H. Joko Widodo meresmikan Pelabuhan Kijing secara langsung dan didampingi oleh Iriana Joko Widodo, Pimpinan dan Anggota DPR-RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati Kabupaten Mempawah, Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Direktur Utama, Komisaris, dan Direksi PT. Pelindo.

Pelabuhan Terminal Kijing merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya dilakukan oleh PT. Pelindo, dan mendapatkan konsesi dari Pemerintah. Pembangunan ini dilatarbelakangi oleh Pelabuhan Dwikora Pontianak yang semakin terbatas akibat pendangkalan dan juga berada di tengah kota.

Pelabuhan Terminal Kijing diharapkan dapat menggantikan Pelabuhan Dwikora Pontianak, dan memberikan ruang dan peluang bagi industri-industri yang tumbuh di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki potensi luar biasa, serta juga memberikan kesempatan tol laut untuk menyinggahi produk-produk dalam negeri ke Kalimantan Barat. Konektivitas antarpulau akan menjadi baik dengan kehadiran Pelabuhan Terminal Kijing ini.

Pelabuhan ini diharapkan akan memperkuat daya saing dari produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh Kalimantan Barat, yang memiliki kekuatan besar pada minyak kelapa sawit (CPO), alumina, bauksit, dan produk-produk unggulan lainnya. Presiden meyakini program hilirisasi alumina dan bauksit dapat terrealisasi sehingga Kalimantan Barat akan mendapatkan nilai tambah dalam pendapatan negara, mulai dari pajak perusahaan, pajak karyawan, bea masuk, dan PNBP lainnya. Pelabuhan ini memiliki kapasitas 500 ribu TEUs dan 8 juta

non peti kemas, sehingga dapat dikatakan sebagai pelabuhan terbesar di Kalimantan.

Kehadiran Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah akan mendongkrak daya saing Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi tersebut memiliki banyak potensi besar antara lain berupa minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), alumina, bauksit, dan komoditas lainnya. Selain itu, kehadiran Pelabuhan Pontianak juga diyakini akan mendukung upaya hilirisasi dan industrialisasi yang gencar dilakukan pemerintah. Presiden meyakini bahwa dengan adanya hilirisasi dan industrialisasi, maka pemerintah akan mendapatkan nilai tambah yang berlipat, baik berupa pendapatan negara hingga terbukanya lapangan pekerjaan.

Pelabuhan tersebut juga hadir untuk bisa mendongkrak kecepatan, konektivitas, dan efisiensi pengiriman logistik yang menjadi salah satu faktor penentu tingkat daya saing Indonesia di pasar global. Presiden juga tidak menutup kemungkinan jika di kemudian hari ada investor luar negeri yang tertarik untuk berinvestasi di pelabuhan tersebut.

Untuk Pelabuhan udara di Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Kubu Raya (sebelumnya Kabupaten Pontianak) yang sampai saat ini masih bernama Bandara Supadio. Bandara Udara Supadio saat ini sudah berstatus Bandar Udara Internasional. Selain Supadio, juga terdapat bandar udara perintis di Ketapang, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

BAB III

SUMBER DATA

Dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

A. Data Registrasi

Data Registrasi adalah data yang diperoleh dari hasil Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). Data registrasi yang digunakan adalah Data SIK Skala Provinsi Semester 2 tahun 2022 yang telah dikonsolidasikan oleh Data Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

B. Data Non Registrasi

Data Non Registrasi adalah data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Skala Provinsi yang diperoleh diluar dari hasil pelayanan Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Data dimaksud berupa :

1. Profil perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota.
2. Laporan reguler Perkembangan Pelayanan administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota.

C. Data Lintas Sektor Terkait

Data Lintas Sektor adalah data yang diperoleh untuk menunjang serta melengkapi data Lain diluar Data registrasi dan Non registrasi. Data tersebut diantaranya terkait dengan kondisi geografis, demografis, gambaran ekonomi daerah dan potensi daerah.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Kuantitas Penduduk

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Provinsi Kalimantan Barat sebagian besar merupakan wilayah daratan seluas 147.037 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.497.151 jiwa, yang terdiri dari 2.826.287 jiwa (51,41%) laki-laki dan 2.670.864 jiwa (48,59%) perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Pontianak sebanyak 673.400 jiwa (12,25%), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 128.684 jiwa (2,34%). Untuk jelasnya lihat Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Kab. Sambas	328.468	312.370	640.838	11,66%
2	Kab. Mempawah	158.173	150.598	308.771	5,62%
3	Kab. Sanggau	255.208	235.597	490.805	8,93%
4	Kab. Ketapang	298.430	277.387	575.817	10,47%
5	Kab. Sintang	224.384	209.230	433.614	7,89%
6	Kab. Kapuas Hulu	136.680	129.971	266.651	4,85%
7	Kab. Bengkayang	150.920	139.668	290.588	5,29%
8	Kab. Landak	213.231	192.089	405.320	7,37%
9	Kab. Sekadau	112.711	104.757	217.468	3,96%
10	Kab. Melawi	108.297	101.661	209.958	3,82%
11	Kab. Kayong Utara	66.276	62.408	128.684	2,34%
12	Kab. Kubu Raya	313.951	300.959	614.910	11,19%
13	Kota Pontianak	336.695	336.705	673.400	12,25%
14	Kota Singkawang	122.863	117.464	240.327	4,37%
Jumlah		2.826.287	2.670.864	5.497.151	100%
%		51.41%	48.59%	100	

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

b) Kepadatan Penduduk

Penduduk Kalimantan Barat tersebar di 14 kabupaten/kota, 174 Kecamatan dan 2.046 Desa dan 99 kelurahan, kondisi persebaran penduduk tersebut masih belum merata, ada yang padat ada pula yang jarang.

Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Barat rata-rata adalah 37 jiwa/Km². Kota Pontianak merupakan wilayah terpadat penduduknya yaitu 673.400 jiwa yang luas wilayahnya 118,209 Km² (5.691 jiwa/Km²), sedangkan jumlah penduduk yang relatif jarang/kecil adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan jumlah penduduk sebanyak 266.651 jiwa yang luas wilayah 31.318,246 Km² (8 jiwa/Km²). Tingkat kepadatan penduduk Kalimantan Barat tersaji dalam Tabel 4.2 di berikut ini.

Tabel 4.2
Persebaran Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Persentase (%)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Kab. Sambas	640.838	11,66%	5.937,995	108
Kab. Mempawah	308.771	5,62%	1.935,419	159
Kab. Sanggau	490.805	8,93%	12.452,224	39
Kab. Ketapang	575.817	10,47%	30.018,676	19
Kab. Sintang	433.614	7,89%	22.025,788	19
Kab. Kapuas Hulu	266.651	4,85%	31.318,246	8
Kab. Bengkayang	290.588	5,29%	5.488,608	52
Kab. Landak	405.320	7,37%	8.430,711	48
Kab. Sekadau	217.468	3,96%	5.979,044	37
Kab. Melawi	209.958	3,82%	10.122,513	21
Kab. Kayong Utara	128.684	2,34%	4.110,123	31
Kab. Kubu Raya	614.910	11,19%	8.549,294	71
Kota Pontianak	673.400	12,25%	118,209	5.691
Kota Singkawang	240.327	4,37%	550,187	435
Kalimantan Barat	5.497.151	100%	147.037,037	37

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

c) Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 berdasarkan jumlah penduduk per kabupaten/kota mengalami kenaikan 0,55% sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.3 di bawah ini.

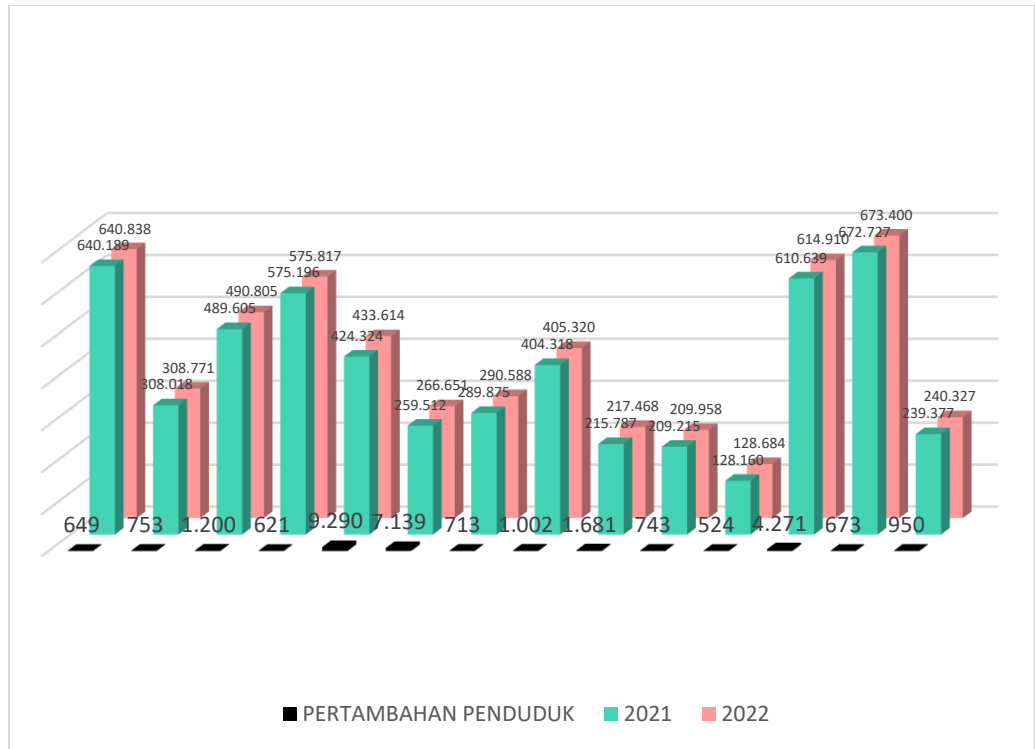
Tabel 4.3
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)		Pertumbuhan Per Tahun (%)
	2021	2022	
Kab. Sambas	640.189	640.838	0,10%
Kab. Mempawah	308.018	308.771	0,24%
Kab. Sanggau	489.605	490.805	0,24%
Kab. Ketapang	575.196	575.817	0,11%
Kab. Sintang	424.324	433.614	2,17%
Kab. Kapuas Hulu	259.512	266.651	2,71%
Kab. Bengkayang	289.875	290.588	0,25%
Kab. Landak	404.318	405.320	0,25%
Kab. Sekadau	215.787	217.468	0,78%
Kab. Melawi	209.215	209.958	0,35%
Kab. Kayong Utara	128.160	128.684	0,41%
Kab. Kubu Raya	610.639	614.910	0,70%
Kota Pontianak	672.727	673.400	0,10%
Kota Singkawang	239.377	240.327	0,40%
Kalimantan Barat	5.466.942	5.497.151	0,55%

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat, terbesar terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 2,71 persen dan yang terendah pertumbuhan penduduknya di Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak sebesar 0,10 persen. Secara grafik pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat disajikan pada grafik batang 4.1 di berikut ini.

Grafik 4.1
Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021-2022



2. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

a) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

1) Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan. Rasio Jenis Kelamin atau RJK dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil, juga untuk merancang pengembangan pendidikan berwawasan gender. Informasi tentang rasio jenis kelamin juga dianggap penting untuk diketahui oleh para politisi, terutama untuk mengetahui keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sex ratio menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan pada tingkatan struktur umur tergambar pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok umur	Laki – laki	Perempuan	Sex Ratio
0 – 4 tahun	214.300	199.160	108
5 – 9 tahun	259.895	241.989	107
10 – 14 tahun	264.686	248.285	107
15 – 19 tahun	241.972	230.117	105
20 – 24 tahun	253.973	241.654	105
25 – 29 tahun	231.081	217.436	106
30 – 34 tahun	227.364	215.573	105
35 – 39 tahun	228.821	215.375	106
40 – 44 tahun	223.255	207.145	108
45 – 49 tahun	184.672	172.979	107
50 – 54 tahun	157.269	144.832	109
55 – 59 tahun	114.432	109.641	104
60 – 64 tahun	91.846	91.311	101
65 – 69 tahun	60.024	59.054	102
70 – 74 tahun	37.045	38.443	96
> = 75 tahun	35.652	37.870	94
Jumlah	2.826.287	2.670.864	106

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *sex ratio* penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebesar 106 persen, artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 106 orang penduduk laki-laki. Struktur umur di atas 65 – 69 tahun *sex ratio* nya semakin kecil, ini menunjukkan bahwa laki-laki pada umur di atas 70 tahun resiko kematiannya lebih tinggi dibanding perempuan, sehingga struktur umur 70 tahun keatas akan lebih banyak perempuan dari pada laki-laki.

Rasio jenis kelamin di suatu daerah dipengaruhi oleh jenis kelamin waktu lahir, pola mortalitas antara penduduk laki-laki dan

perempuan, pola migrasi antara penduduk laki-laki dan perempuan. Data *sex ratio* atau ratio jenis kelamin (RJK) penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini.

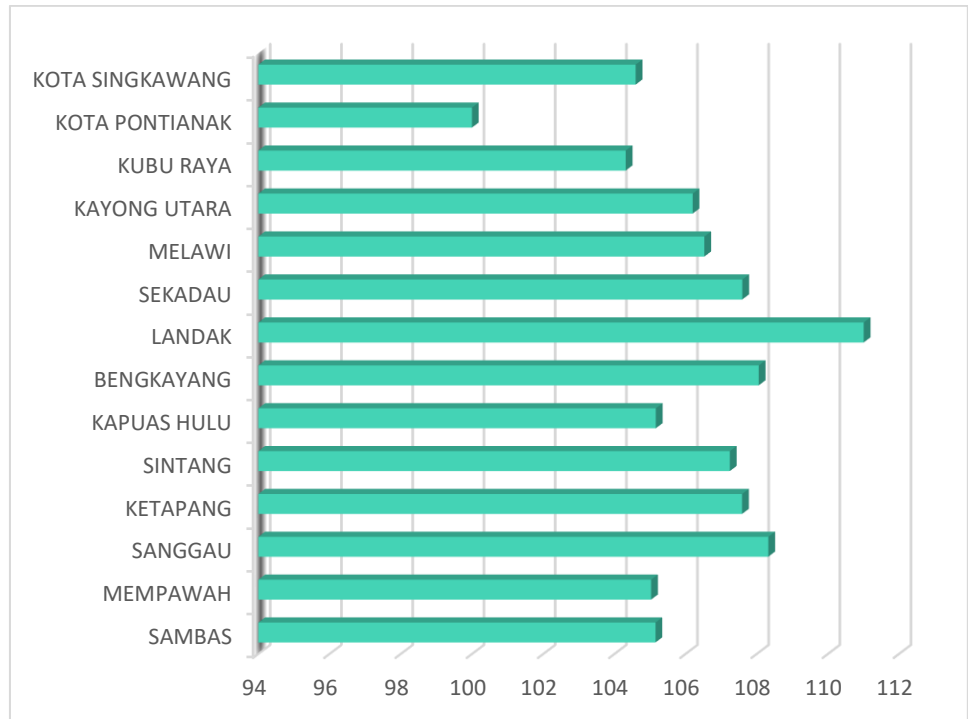
Tabel 4.5
Rasio Jenis Kelamin
Per Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio
1	Kab. Sambas	328.468	312.370	105
2	Kab. Mempawah	158.173	150.598	105
3	Kab. Sanggau	255.208	235.597	108
4	Kab. Ketapang	298.430	277.387	108
5	Kab. Sintang	224.384	209.230	107
6	Kab. Kapuas Hulu	136.680	129.971	105
7	Kab. Bengkayang	150.920	139.668	108
8	Kab. Landak	213.231	192.089	111
9	Kab. Sekadau	112.711	104.757	108
10	Kab. Melawi	108.297	101.661	107
11	Kab. Kayong Utara	66.276	62.408	106
12	Kab. Kubu Raya	313.951	300.959	104
13	Kota Pontianak	336.695	336.705	100
14	Kota Singkawang	122.863	117.464	105
Kalimantan Barat		2.826.287	2.670.864	106

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Sex ratio atau rasio jenis kelamin pada tabel 4.5 menunjukkan rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Landak, yaitu 111, sedangkan rasio jenis kelamin terkecil adalah Kota Pontianak 100. Rasio jenis kelamin disajikan dalam grafik batang berikut.

Grafik 4.2
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kalimantan Barat



2) Piramida Penduduk

Piramida penduduk menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik. Adapun komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat Tabel 4.6 berikut ini :

Tabel 4.6
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

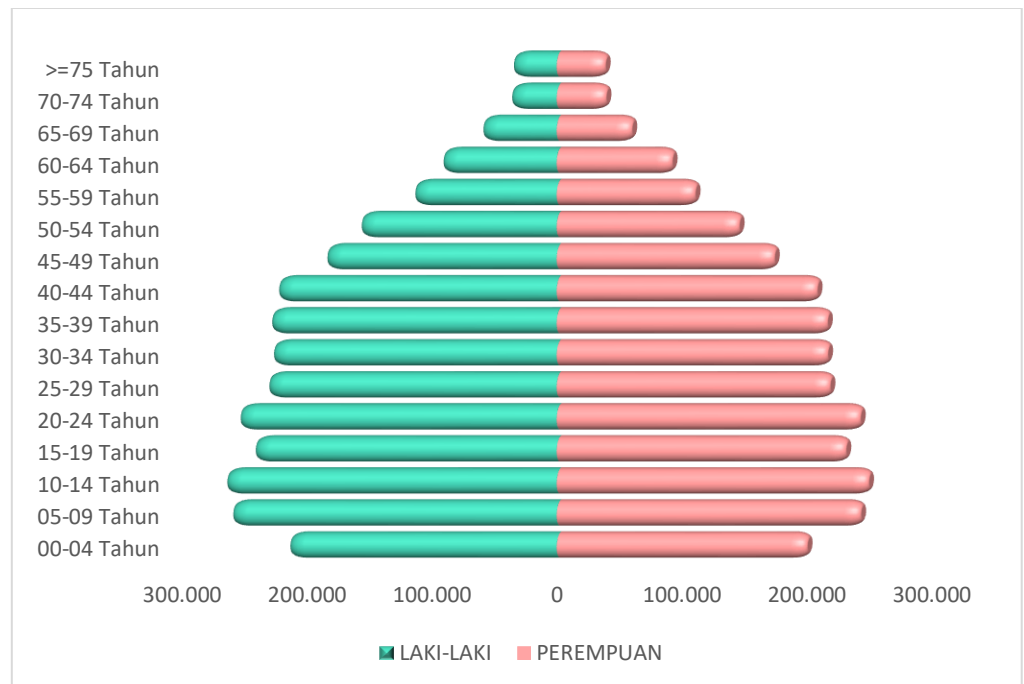
Kelompok Umur	Lk (jiwa)	Pr (jiwa)	Lk + Pr	Persen (%)
00-04 Tahun	214.300	199.160	413.460	7,52%
05-09 Tahun	259.895	241.989	501.884	9,13%
10-14 Tahun	264.686	248.285	512.971	9,33%
15-19 Tahun	241.972	230.117	472.089	8,59%
20-24 Tahun	253.973	241.654	495.627	9,02%
25-29 Tahun	231.081	217.436	448.517	8,16%
30-34 Tahun	227.364	215.573	442.937	8,06%
35-39 Tahun	228.821	215.375	444.196	8,08%

40-44 Tahun	223.255	207.145	430.400	7,83%
45-49 Tahun	184.672	172.979	357.651	6,51%
50-54 Tahun	157.269	144.832	302.101	5,50%
55-59 Tahun	114.432	109.641	224.073	4,08%
60-64 Tahun	91.846	91.311	183.157	3,33%
65-69 Tahun	60.024	59.054	119.078	2,17%
70-74 Tahun	37.045	38.443	75.488	1,37%
>=75 Tahun	35.652	37.870	73.522	1,34%
Jumlah	2.826.287	2.670.864	5.497.151	100%

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Dari tabel di atas kelompok usia muda (usia 0 s.d. 14 tahun) sebesar 25,98 persen, usia produktif (usia 15 s.d 64 tahun) sebesar 69,14 persen, sedangkan yang tergolong usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) adalah 4,88 persen. Piramida pengelompokan usia sebagai berikut :

Grafik 4.3
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Berdasarkan komposisi usia dan jenis kelamin karakteristik penduduk dari suatu negara, piramida penduduk dapat dibedakan atas tiga model yaitu ekspansif, stationer dan constructive. Model piramida yang ditampilkan di atas adalah **model ekspansif** yaitu kelompok usia muda yang terdapat dalam suatu wilayah lebih banyak dari pada kelompok usia tua.

3) Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif dengan banyaknya penduduk usia produktif, penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia di atas 64 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun, walaupun kenyataannya ada yang masih produktif pada usia tersebut. Penduduk usia 15 – 64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap usia produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan dapat dilihat menurut usia yakni Rasio Ketergantungan Muda dan Rasio Ketergantungan Tua.

⇒ Rasio Ketergantungan Muda adalah perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 – 64 tahun.

⇒ Rasio Ketergantungan Tua adalah perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15 – 64 tahun.

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4.7
Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Σ Penduduk	%
0 - 14 Tahun (Muda)	738.881	689.434	1.428.315	25,98%
15 - 64 Tahun (Produktif)	1.954.685	1.846.063	3.800.748	69,14%
>65 Tahun (Tua)	132.721	135.367	268.088	4,88%
Kalimantan Barat	2.826.287	2.670.864	5.497.151	100,00%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

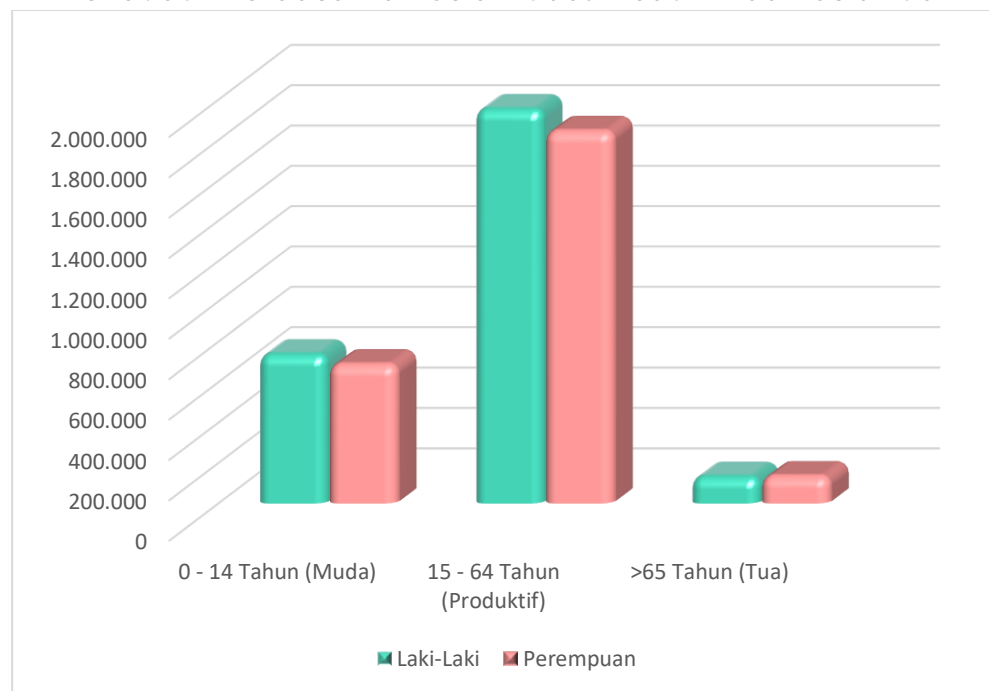
Tabel 4.7 menunjukkan proporsi persentase penduduk berdasarkan usia muda, produktif dan usia tua. Dimana persentase kelompok umur 0-14 tahun sebesar 25,98 persen. kelompok umur 15-64 tahun sebesar 69,14 persen dan kelompok umur di atas 65

tahun sebesar 4,88 persen. Untuk mengetahui Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban tanggungan adalah :

$$RK = \frac{1.428.315 + 268.088}{3.800.748} \times 100 = 44.63$$

Rasio ketergantungan total sebesar 44,63 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Grafik 4.4
Penduduk Berdasarkan Usia Muda. Produktif dan Usia Tua



b) Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Status Kawin

Data mengenai sebaran jumlah penduduk berdasarkan Status Perkawinan di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022, dibagi pada kategori Belum Kawin, Kawin, Cerai Hidup dan Cerai Mati sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan

No	Status Kawin	Jumlah Penduduk					
		Laki-Laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Belum Kawin	1.499.679	53,36	1.200.703	45,20	2.700.382	49,39
2	Kawin	1.243.489	44,24	1.261.410	47,48	2.504.899	45,82
3	Cerai Hidup	28.239	1,00	41.288	1,55	69.527	1,27
4	Cerai Mati	39.061	1,39	153.073	5,76	192.134	3,51
Jumlah		2.810.468	100	2.656.474	100	5.466.942	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa, persentase penduduk yang belum kawin mencapai 49,39% atau berjumlah 2.700.382 jiwa, penduduk yang kawin mencapai 2.504.899 jiwa atau sebanyak 45,82%, sedangkan yang berstatus cerai terlihat pada umumnya jumlah cerai mati (192.134 jiwa atau sebanyak 3,51%) lebih banyak dari pada cerai hidup (69.527 jiwa atau sebanyak 1,27%).

1) Angka Perkawinan Kasar

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun pada suatu tahun tertentu.

Angka Perkawinan Kasar ini merupakan indikator perkawinan yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, tetapi bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Data mengenai Angka Perkawinan Kasar di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Angka Perkawinan Kasar

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Kawin Tahun 2022	Σ Penduduk Tengah Tahun 2022	Angka Perkawinan Kasar
1	Kab. Sambas	4.420	640.578	6,90
2	Kab. Mempawah	2.183	308.640	7,07
3	Kab. Sanggau	3.115	490.607	6,35
4	Kab. Ketapang	4.119	575.579	7,16
5	Kab. Sintang	1.605	429.357	3,74
6	Kab. Kapuas Hulu	2.240	263.090	8,51
7	Kab. Bengkayang	1.169	290.464	4,02
8	Kab. Landak	1.404	405.156	3,47
9	Kab. Sekadau	1.030	216.260	4,76
10	Kab. Melawi	1.449	209.673	6,91
11	Kab. Kayong Utara	1.035	128.415	8,06
12	Kab. Kubu Raya	5.589	611.223	9,14
13	Kota Pontianak	4.938	673.129	7,34
14	Kota Singkawang	2.524	239.875	10,52
Jumlah		36.820	5.482.046	6,72

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

2) Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada satu tahun tertentu.

Angka Perkawinan Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perkawinan Kasar karena dalam perhitungan ini hanya memasukkan penduduk yang beresiko kawin saja yaitu penduduk yang berumur 15 tahun keatas sebagai faktor penyebut. Sedangkan penduduk berusia di bawah 15 tahun tidak diikutsertakan sebagai penyebut karena dianggap belum terpapar terhadap peristiwa perkawinan.

Data mengenai Angka Perkawinan Umum di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Angka Perkawinan Umum

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Kawin Tahun 2022	Σ Penduduk Umur > 14 Tahun	Angka Perkawinan Umum
1	Kab. Sambas	4.420	534.933	8,26
2	Kab. Mempawah	2.183	258.653	8,44
3	Kab. Sanggau	3.115	415.861	7,49
4	Kab. Ketapang	4.119	486.852	8,46
5	Kab. Sintang	1.605	354.636	4,53
6	Kab. Kapuas Hulu	2.240	220.650	10,15
7	Kab. Bengkayang	1.169	242.588	4,82
8	Kab. Landak	1.404	335.052	4,19
9	Kab. Sekadau	1.030	180.834	5,7
10	Kab. Melawi	1.449	175.362	8,26
11	Kab. Kayong Utara	1.035	107.396	9,64
12	Kab. Kubu Raya	5.589	503.835	11,09
13	Kota Pontianak	4.938	564.271	8,75
14	Kota Singkawang	2.524	197.545	12,78
Jumlah		36.820	4.578.468	8,04

*Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

3) Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur adalah angka yang menunjukkan berapa banyak penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi remaja.

Data mengenai Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Angka Perkawinan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Σ Peristiwa Kawin Tahun 2022	Σ Penduduk Laki-Laki Tengah Tahun 2022	Σ Penduduk Perempuan Tengah Tahun 2022	Angka Kawin Laki-Laki	Angka Kawin Perempuan
00-04	0	207.752	193.600	0,00	0,00
05-09	0	260.071	242.155	0,00	0,00
10-14	0	263.608	247.069	0,00	0,00
15-19	563	247.775	236.155	2,27	2,38
20-24	11.397	250.872	238.126	45,43	47,86
25-29	13.865	229.343	217.195	60,46	63,84
30-34	5.475	228.407	216.167	23,97	25,33
35-39	2.314	232.458	218.987	9,95	10,57
40-44	1.373	218.758	202.783	6,28	6,77
45-49	716	183.977	172.419	3,89	4,15
50-54	463	154.069	141.813	3,01	3,26
55-59	312	115.195	110.331	2,71	2,83
60-64	177	91.201	90.571	1,94	1,95
65-69	86	59.972	58.944	1,43	1,46
70-74	55	36.461	38.585	1,51	1,43
>=75	24	37.232	39.995	0,64	0,60

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

4) Rata-Rata Umur Kawin Pertama

Rata-rata usia perkawinan pertama atau *Singulate Mean Age at Marriage* (SMAM) adalah perkiraan rata-rata usia kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Tersedianya indikator ini akan memudahkan para penentu kebijakan dan perencana pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan terutama terhadap penduduk kelompok usia muda untuk menunda perkawinan dan agar dapat menyelesaikan pendidikan 9 tahun.

Selain itu, usia kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua usia kawin pertama perempuan, maka semakin sedikit pula jumlah anak yang akan dilahirkannya. Hal ini terjadi karena semakin tinggi usia kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek pula masa usia suburnya dan pada akhirnya akan

menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

Rata-rata usia perkawinan pertama untuk jenis kelamin perempuan adalah 25,85 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin laki-laki usia perkawinan pertama adalah 29,89 tahun.

5) Angka Perceraian Kasar

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk suatu tahun tertentu.

Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologis suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka Perceraian Kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur, maka indikator ini sangat berguna terutama dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Data mengenai Angka Perceraian Kasar di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.12
Angka Perceraian Kasar

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Cerai Tahun 2022	Σ Penduduk Tengah Tahun 2022	Angka Perceraian Kasar
1	Kab. Sambas	965	640.578	1,51
2	Kab. Mempawah	324	308.640	1,05
3	Kab. Sanggau	279	490.607	0,57
4	Kab. Ketapang	700	575.579	1,22
5	Kab. Sintang	361	429.357	0,84
6	Kab. Kapuas Hulu	225	263.090	0,86
7	Kab. Bengkayang	193	290.464	0,66
8	Kab. Landak	74	405.156	0,18
9	Kab. Sekadau	87	216.260	0,40
10	Kab. Melawi	157	209.673	0,75

11	Kab. Kayong Utara	148	128.415	1,15
12	Kab. Kubu Raya	633	611.223	1,04
13	Kota Pontianak	1.025	673.129	1,52
14	Kota Singkawang	467	239.875	1,95
Jumlah		5.638	5.482.046	1,03

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

6) Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas pada suatu tahun tertentu. Angka Perceraian Umum lebih cermat dibandingkan dengan Angka Perceraian Kasar.

Data mengenai Angka Perceraian Umum di Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.13
Angka Perceraian Umum

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Cerai Tahun 2022	Σ Penduduk Umur > 14 Tahun Tengah Tahun 2022	Angka Perceraian Umum
1	Kab. Sambas	965	534.933	1,8
2	Kab. Mempawah	324	258.653	1,25
3	Kab. Sanggau	279	415.861	0,67
4	Kab. Ketapang	700	486.852	1,44
5	Kab. Sintang	361	354.636	1,02
6	Kab. Kapuas Hulu	225	220.650	1,02
7	Kab. Bengkayang	193	242.588	0,8
8	Kab. Landak	74	335.052	0,22
9	Kab. Sekadau	87	180.834	0,48
10	Kab. Melawi	157	175.362	0,9
11	Kab. Kayong Utara	148	107.396	1,38
12	Kab. Kubu Raya	633	503.835	1,26
13	Kota Pontianak	1.025	564.271	1,82
14	Kota Singkawang	467	197.545	2,36
Jumlah		5.638	4.578.468	1,23

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

3. Keluarga

a) Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu

keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil. Angka Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.14
Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

No	Kabupaten/Kota	Σ Penduduk	Σ Kepala Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
1	Kab. Sambas	640.838	195.086	3,28
2	Kab. Mempawah	308.771	91.737	3,37
3	Kab. Sanggau	490.805	150.065	3,27
4	Kab. Ketapang	575.817	187.117	3,08
5	Kab. Sintang	433.614	136.775	3,17
6	Kab. Kapuas Hulu	266.651	87.042	3,06
7	Kab. Bengkayang	290.588	84.145	3,45
8	Kab. Landak	405.320	116.099	3,49
9	Kab. Sekadau	217.468	66.584	3,27
10	Kab. Melawi	209.958	66.460	3,16
11	Kab. Kayong Utara	128.684	39.436	3,26
12	Kab. Kubu Raya	614.910	188.037	3,27
13	Kota Pontianak	673.400	204.053	3,30
14	Kota Singkawang	240.327	73.015	3,29
Jumlah		5.497.151	1.685.651	3,26

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

b) Hubungan Dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluargatersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Angka Status Hubungan dengan Kepala Keluarga Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.15
Status Hubungan dengan Kepala Keluarga

Status Hubungan Dengan Kepala Keluarga	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kepala Keluarga	1.397.834	49,46%	287.817	10,78%	1.685.651	30,66%
Suami	133	0,00%	0	0,00%	133	0,00%
Istri	0	0,00%	1.186.418	44,42%	1.186.418	21,58%
Anak	1.367.899	48,40%	1.117.591	41,84%	2.485.490	45,21%
Menantu	141	0,00%	284	0,01%	425	0,01%
Cucu	9.708	0,34%	7.761	0,29%	17.469	0,32%
Orang Tua	2.957	0,10%	13.354	0,50%	16.311	0,30%
Mertua	1.570	0,06%	7.514	0,28%	9.084	0,17%
Famili Lain	33.659	1,19%	30.199	1,13%	63.858	1,16%
Pembantu	12.386	0,44%	19.926	0,75%	32.312	0,59%
Lainnya	1.397.834	49,46%	287.817	10,78%	1.685.651	30,66%
Jumlah	2.826.287	100%	2.670.864	100%	5.497.151	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

c) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Informasi tentang kelompok umur dari Kepala Keluarga dan Anggota keluarga penting diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan dan lain-lain.

Angka Kepala Keluarga berdasarkan umur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
< 15	317	0,02%	250	0,09%	567	0,03%
15-19	1.832	0,13%	1.397	0,49%	3.229	0,19%
20-24	32.344	2,31%	8.310	2,89%	40.654	2,41%
25-29	103.726	7,42%	13.605	4,73%	117.331	6,96%
30-34	162.662	11,64%	17.546	6,10%	180.208	10,69%
35-39	192.762	13,79%	20.793	7,22%	213.555	12,67%
40-44	207.054	14,81%	24.301	8,44%	231.355	13,72%
45 -49	179.480	12,84%	25.529	8,87%	205.009	12,16%
50-54	157.571	11,27%	29.059	10,10%	186.630	11,07%
55-59	121.039	8,66%	31.677	11,01%	152.716	9,06%
60-64	94.237	6,74%	33.881	11,77%	128.118	7,60%
65-69	65.655	4,70%	30.728	10,68%	96.383	5,72%
70-74	40.138	2,87%	22.903	7,96%	63.041	3,74%
>=75	39.017	2,79%	27.838	9,67%	66.855	3,97%
Jumlah	1.397.834	100%	287.817	100%	1.685.651	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

d) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik Kepala Keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjai kepala keluarga, bagaimana kecenderungan di masa depan dan bagaimana gambaran social ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan

Angka Kepala Keluarga berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.17
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Kabupaten / Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kab. Sambas	158.741	11,36%	36.345	12,63%	195.086	11,57%
Kab. Mempawah	74.294	5,31%	17.443	6,06%	91.737	5,44%
Kab. Sanggau	129.314	9,25%	20.751	7,21%	150.065	8,90%
Kab. Ketapang	157.171	11,24%	29.946	10,40%	187.117	11,10%
Kab. Sintang	117.896	8,43%	18.879	6,56%	136.775	8,11%
Kab. Kapuas Hulu	71.772	5,13%	15.270	5,31%	87.042	5,16%
Kab. Bengkayang	69.648	4,98%	14.497	5,04%	84.145	4,99%
Kab. Landak	100.464	7,19%	15.635	5,43%	116.099	6,89%
Kab. Sekadau	57.491	4,11%	9.093	3,16%	66.584	3,95%
Kab. Melawi	56.978	4,08%	9.482	3,29%	66.460	3,94%
Kab. Kayong Utara	33.105	2,37%	6.331	2,20%	39.436	2,34%
Kab. Kubu Raya	155.455	11,12%	32.582	11,32%	188.037	11,16%
Kota Pontianak	158.830	11,36%	45.223	15,71%	204.053	12,11%
Kota Singkawang	56.675	4,05%	16.340	5,68%	73.015	4,33%
Jumlah	1.397.834	100%	287.817	100%	1.685.652	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

e) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Angka Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Status Kawin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Belum Kawin	75.286	5,39%	35.014	12,17%	110.300	6,54%
Kawin	1.252.710	89,62%	72.527	25,20%	1.325.237	78,62%
Cerai Hidup	30.959	2,21%	40.821	14,18%	71.780	4,26%
Cerai Mati	38.879	2,78%	139.455	48,45%	178.334	10,58%
Jumlah	1.397.834	100%	287.817	100%	1.685.651	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

f) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga. Untuk itu jenjang pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Angka Kepala Keluarga berdasarkan pendidikan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Belum / Tdk Seklah	66.044	4,72	41.152	14,30	107.196	6,36
Tidak Tamat SD	100.171	7,17	34.368	11,94	134.539	7,98
Tamat SD	526.976	37,70	120.070	41,72	647.046	38,39
SLTP/Sederajat	242.809	17,37	36.412	12,65	279.221	16,56
SLTA/Sederajat	349.651	25,01	42.593	14,80	392.244	23,27
Diploma I/II	9.590	0,69	1.859	0,65	11.449	0,68
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	22.587	1,62	3.175	1,10	25.762	1,53
Diploma IV/Srata I	73.503	5,26	7.592	2,64	81.095	4,81
Strata II	6.178	0,44	553	0,19	6.731	0,40
Strata III	325	0,02	43	0,01	368	0,02
Jumlah	1.397.834	100	287.817	100	1.685.651	100

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

g) Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan mereka kepada pot ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Angka Kepala Keluarga berdasarkan pekerjaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.20
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Belum / Tidak Bekerja	19.511	1,40	12.212	4,24	31.723	1,88
Mengurus Rumah Tangga	253	0,02	161.188	56,00	161.441	9,58
Pelajar / Mahasiswa	11.815	0,85	6.999	2,43	18.814	1,12
PNS	43.555	3,12	6.050	2,10	49.605	2,94
TNI	9.823	0,70	56	0,02	9.879	0,59
POLRI	9.012	0,64	60	0,02	9.072	0,54
Pensiunan	16.052	1,15	2.614	0,91	18.666	1,11
Bekerja / Lainnya	1.287.813	92,13	98.638	34,27	1.386.451	82,25
Jumlah	1.397.834	100	287.817	100	1.685.651	100

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

4. Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a) Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Jumlah penduduk menurut Pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang Pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan Pendidikan di suatu provinsi sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Angka Jumlah penduduk menurut Pendidikan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.21
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		L+P	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Tidak/Belum Sekolah	747.954	26,46%	728.913	27,29%	1.476.867	26,87%
Belum Tamat SD/Sederajat	381.111	13,48%	354.043	13,26%	735.154	13,37%
Tamat SD/Sederajat	715.095	25,30%	706.226	26,44%	1.421.321	25,86%
SLTP/Sederajat	379.893	13,44%	353.027	13,22%	732.920	13,33%
SLTA/Sederajat	475.049	16,81%	392.228	14,69%	867.277	15,78%
Diploma I/II	10.296	0,36%	11.278	0,42%	21.574	0,39%
Akademi/Diploma III/S. Muda	26.095	0,92%	35.791	1,34%	61.886	1,13%
Diploma IV/Strata I	83.922	2,97%	85.447	3,20%	169.369	3,08%
Strata II	6.526	0,23%	3.738	0,14%	10.264	0,19%
Strata III	346	0,01%	173	0,01%	519	0,01%
Jumlah	2.826.287	100%	2.670.864	100%	5.497.151	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

b) Jumlah Penduduk Menurut Agama

Jumlah penduduk menurut agama ini menunjukkan karakteristik penduduk provinsi Kalimantan Barat berdasarkan agama yang dianut. Angka Jumlah penduduk menurut agama disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.22
Jumlah Penduduk Menurut Agama

Kabupaten/ Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan	Jumlah
Kab. Sambas	568.466	11.888	18.529	179	38.746	3.028	2	640.838
Kab. Mempawah	232.288	19.635	23.699	74	31.785	970	320	308.771
Kab. Sanggau	165.867	83.251	237.933	135	3.393	101	125	490.805
Kab. Ketapang	375.172	45.748	146.671	489	6.770	618	349	575.817
Kab. Sintang	169.321	103.780	157.623	116	2.280	491	3	433.614
Kab. Kapuas Hulu	161.629	22.620	81.714	31	288	367	2	266.651
Kab. Bengkayang	102.782	78.577	90.801	270	15.536	2.541	81	290.588
Kab. Landak	65.431	121.744	215.528	47	2.336	233	1	405.320

Kab. Sekadau	85.335	30.154	100.270	4	1.410	267	28	217.468
Kab. Melawi	111.482	48.974	48.208	39	1.010	244	1	209.958
Kab. Kayong Utara	123.175	1.734	953	512	1.881	426	3	128.684
Kab. Kubu Raya	510.247	24.755	35.431	494	42.551	1.413	19	614.910
Kota Pontianak	518.952	32.657	40.022	316	78.343	3.105	5	673.400
Kota Singkawang	130.572	13.440	17.891	71	76.344	2.005	4	240.327
Jumlah	3.320.719	638.957	1.215.273	2.777	302.673	15.809	943	5.497.151
Persen	60,41%	11,62%	22,11%	0,05%	5,51%	0,29%	0,02%	100%

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

c) Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan yang disajikan dalam bentuk tabel. Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.23
Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kecacatan						Jumlah
		Fisik	Netra	Rungu	Mental	Fisik Dan Mental	Lainnya	
1	Kab. Sambas	84	60	105	313	26	42	630
2	Kab. Mempawah	119	173	105	201	37	60	695
3	Kab. Sanggau	119	104	166	185	70	52	1.325
4	Kab. Ketapang	203	243	138	230	33	108	955
5	Kab. Sintang	156	78	141	218	30	114	2.280
6	Kab. Kapuas Hulu	147	61	141	180	35	62	626
7	Kab. Bengkayang	66	58	59	199	16	38	2.906
8	Kab. Landak	52	40	81	223	26	65	487
9	Kab. Sekadau	51	18	44	56	8	56	3.393
10	Kab. Melawi	32	30	28	71	9	40	210
11	Kab. Kayong Utara	25	55	20	39	3	57	3.603
12	Kab. Kubu Raya	176	60	172	212	20	1.162	1.802
13	Kota Pontianak	735	71	242	334	39	172	5.405
14	Kota Singkawang	32	10	83	229	7	23	384
Jumlah		1.997	1.061	1.525	2.690	359	2.051	9.683

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

5. Kelahiran

a) Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu. Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas Kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang.

Jumlah kelahiran di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.24
Angka Kelahiran

Kabupaten / Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Penduduk	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%
Kab. Sambas	2.833	10,86%	2.687	11,18%	5.520	11,01%
Kab. Mempawah	1.841	7,06%	1.632	6,79%	3.473	6,93%
Kab. Sanggau	1.842	7,06%	1.670	6,95%	3.512	7,01%
Kab. Ketapang	2.745	10,52%	2.549	10,61%	5.294	10,56%
Kab. Sintang	1.555	5,96%	1.473	6,13%	3.028	6,04%
Kab. Kapuas Hulu	976	3,74%	911	3,79%	1.887	3,77%
Kab. Bengkayang	1.276	4,89%	1.217	5,06%	2.493	4,97%
Kab. Landak	2.365	9,07%	2.089	8,69%	4.454	8,89%
Kab. Sekadau	664	2,55%	614	2,55%	1.278	2,55%
Kab. Melawi	913	3,50%	862	3,59%	1.775	3,54%
Kab. Kayong Utara	649	2,49%	584	2,43%	1.233	2,46%
Kab. Kubu Raya	3.388	12,99%	3.010	12,52%	6.398	12,77%
Kota Pontianak	3.448	13,22%	3.289	13,69%	6.737	13,44%
Kota Singkawang	1.592	6,10%	1.445	6,01%	3.037	6,06%
Jumlah	26.087	100%	24.032	100%	50.119	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

b) Angka Kelahiran Kasar

Angka kelahiran kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan.

Angka kelahiran Kasar di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.25
Angka Kelahiran Kasar

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Kelahiran Tahun 2022	Σ Penduduk Tengah Tahun 2022	Angka Kelahiran Kasar
1	Kab. Sambas	5.520	640.578	8,62
2	Kab. Mempawah	3.473	308.640	11,25
3	Kab. Sanggau	3.512	490.607	7,16
4	Kab. Ketapang	5.294	575.579	9,20
5	Kab. Sintang	3.028	429.357	7,05
6	Kab. Kapuas Hulu	1.887	263.090	7,17
7	Kab. Bengkayang	2.493	290.464	8,58
8	Kab. Landak	4.454	405.156	10,99
9	Kab. Sekadau	1.278	216.260	5,91
10	Kab. Melawi	1.775	209.673	8,47
11	Kab. Kayong Utara	1.233	128.415	9,60
12	Kab. Kubu Raya	6.398	611.223	10,47
13	Kota Pontianak	6.737	673.129	10,01
14	Kota Singkawang	3.037	239.875	12,66
Jumlah		45.062	5.461.993	8,25

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

6. Kematian

a) Jumlah Kematian

Jumlah Kematian menunjukkan banyaknya kematian yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022. Informasi tentang jumlah kematian bermanfaat untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk.

Angka kematian di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.26
Jumlah Kematian

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kematian	Persentase (%)
1	Kab. Sambas	2.112	14,28%
2	Kab. Mempawah	836	5,65%
3	Kab. Sanggau	1.328	8,98%
4	Kab. Ketapang	1.384	9,36%

5	Kab. Sintang	907	6,13%
6	Kab. Kapuas Hulu	829	5,60%
7	Kab. Bengkayang	627	4,24%
8	Kab. Landak	533	3,60%
9	Kab. Sekadau	374	2,53%
10	Kab. Melawi	345	2,33%
11	Kab. Kayong Utara	471	3,18%
12	Kab. Kubu Raya	1.191	8,05%
13	Kota Pontianak	2.908	19,66%
14	Kota Singkawang	948	6,41%
Jumlah		14.793	100%

Sumber : Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun Tahun 2022. diolah

b) Angka Kematian Kasar

Angka kematian kasar menunjukkan banyaknya kematian di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kematian kasar merupakan indikator sederhana yang tidak memperhitungkan pengaruh umur penduduk dan jenis kelamin.

Angka Kematian Kasar di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.27
Angka Kematian Kasar

No	Kabupaten/Kota	Σ Peristiwa Kematian Tahun 2022	Σ Penduduk Tengah Tahun 2022	Angka Kematian Kasar
1	Kab. Sambas	2.112	640.578	3,30
2	Kab. Mempawah	836	308.640	2,71
3	Kab. Sanggau	1.328	490.607	2,71
4	Kab. Ketapang	1.384	575.579	2,40
5	Kab. Sintang	907	429.357	2,11
6	Kab. Kapuas Hulu	829	263.090	3,15
7	Kab. Bengkayang	627	290.464	2,16
8	Kab. Landak	533	405.156	1,32
9	Kab. Sekadau	374	216.260	1,73
10	Kab. Melawi	345	209.673	1,65

11	Kab. Kayong Utara	471	128.415	3,67
12	Kab. Kubu Raya	1.191	611.223	1,95
13	Kota Pontianak	2.908	673.129	4,32
14	Kota Singkawang	948	239.875	3,95
Jumlah		14.793	5.482.046	2,70

Sumber : Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun Tahun 2022. Diolah

B. Kualitas Penduduk

1. Kesehatan

a) Kelahiran

1) Angka Kelahiran Menurut Umur

Angka kelahiran menurut umur (Age specific Fertility Rate/ASFR) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 perempuan reproduktif (umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran menurut umur merupakan indikator kelahiran yang sudah memperhitungkan perbedaan kelahiran dari perempuan pada setiap kelompok umur. Secara alamiah kemampuan (potensi) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur. Jika digambarkan dengan grafik angka kelahiran menurut umur akan berbentuk U terbalik dengan puncak berada pada kelompok umur reproduksi muda. Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR) akan berguna untuk pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator ASFR ini merupakan data dasar untuk membuat proyeksi penduduk. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan penduduk di tahun mendatang. Dinas Kesehatan sebagai sumber data belum memiliki data penduduk mengenai jumlah kelahiran hidup menurut kelompok umur dan data jumlah kelahiran hidup per kabupaten/kota.

Tabel 4.28
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur (ASFR)

No	Umur	Jumlah Penduduk Perempuan		Jumlah Kelahiran Hidup		Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)
		Σ	%	Σ	%	
1	15 – 19	230.117	15,34%	-		-
2	20 – 24	241.654	16,11%	-		-
3	25 – 29	217.436	14,49%	-		-
4	30 – 34	215.573	14,37%	-		-
5	35 – 39	215.375	14,36%	-		-
6	40 – 44	207.145	13,81%	-		-
7	45 – 49	172.979	11,53%	-		-
Jumlah		1.500.279	100%	-		-

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Angka kelahiran menurut kelompok umur (ASFR) belum dapat dihitung dikarenakan data jumlah kelahiran dari ibu kelompok umur 15-49 tahun tidak tersedia. Angka kelahiran menurut umur juga merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan fertilitas dari perempuan usia subur dengan memperhatikan karakteristik kelompok umurnya. Secara alamiah potensi (fekunditas) perempuan untuk melahirkan berbeda menurut umur dan menjadi steril setelah menopause atau usia 49 tahun. Secara sosial ada kecenderungan saat ini perempuan ingin membatasi jumlah anak setelah umur 35 tahun. Untuk itu, Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR) akan berguna dalam pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Indikator ASFR ini merupakan data dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk dan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Hasil proyeksi penduduk merupakan basis data untuk perencanaan pembangunan manusia di tahun-tahun mendatang.

2) Angka Kelahiran Total

Angka Kelahiran Total/Total Fertility (TFR) merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya.

Angka kelahiran total biasanya digunakan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan program pengendalian kelahiran (program Keluarga Berencana (KB)) di suatu daerah. TFR ini juga dapat digunakan untuk membantu para pengambil kebijakan dan perencana dalam mengembangkan program-program pelayanan kesehatan dan penurunan tingkat kelahiran sekaligus sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan sosial ekonomi.

Sama halnya dengan angka ATFR Angka Kelahiran Total Provinsi Kalimantan Barat (TFR) juga belum dapat disajikan, jadi perhitungan TFR Provinsi Kalimantan Barat belum bisa dihitung karena angka kelahiran berdasarkan kelompok umur belum diketahui sementara ini hanya diketahui jumlah kelahiran hidup per kabupaten.

Tabel 4.29
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)

No	Umur	Perempuan		Kelahiran Hidup	ASFR	TFR
1	15-19	230.117	15,34%	-	-	-
2	20-24	241.654	16,11%	-	-	-
3	25-29	217.436	14,49%	-	-	-
4	30-34	215.573	14,37%	-	-	-
5	35-39	215.375	14,36%	-	-	-
6	40-44	207.145	13,81%	-	-	-
7	45-49	172.979	11,53%	-	-	-
Jumlah		1.500.279	100%	-	-	-

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

3) Rasio Anak Perempuan

Rasio anak dan perempuan adalah rasio antara jumlah anak di bawah lima tahun disuatu tempat pada suatu waktu dengan penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Rasio ini untuk melihat tingkat fertilitas pada suatu wilayah dan rasio ini berguna sebagai indikator fertilitas penduduk apabila tidak ada data kelahiran dan data registrasi.

Angka Rasio Anak dan Perempuan di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.30
Rasio Anak dan Perempuan

No	Kabupaten/Kota	Penduduk Usia 0-4 Tahun	Penduduk Perempuan Usia 15-49 Tahun	Rasio Anak Dan Perempuan
1	Kab. Sambas	47.122	168.723	27,93%
2	Kab. Mempawah	23.606	83.941	28,12%
3	Kab. Sanggau	33.249	135.113	24,61%
4	Kab. Ketapang	41.163	165.024	24,94%
5	Kab. Sintang	33.081	117.627	28,12%
6	Kab. Kapuas Hulu	18.669	72.861	25,62%
7	Kab. Bengkayang	21.873	80.013	27,34%
8	Kab. Landak	32.880	107.423	30,61%
9	Kab. Sekadau	15.421	58.482	26,37%
10	Kab. Melawi	15.374	58.354	26,35%
11	Kab. Kayong Utara	9.738	35.892	27,13%
12	Kab. Kubu Raya	51.452	166.056	30,98%
13	Kota Pontianak	50.037	186.698	26,80%
14	Kota Singkawang	19.795	64.072	30,89%
Jumlah		413.460	1.500.279	27,56%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

b) Kematian

Indikator kematian biasanya digunakan untuk melihat kualitas kesehatan suatu kelompok penduduk di suatu wilayah tertentu. Kematian penduduk dikelompokkan dalam kematian bayi, kematian anak, kematian ibu dan kematian dewasa. Pembagian kematian ini dimaksudkan untuk melihat faktor penyebab kematian yang biasanya spesifik pada setiap kelompok umur.

Kematian bayi misalnya digunakan menjadi indikator penting untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat. Angka kematian bayi dianggap paling sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

1) Angka Kematian Bayi

Keadaan bayi saat dilahirkan menunjukkan gejala lahir hidup atau lahir mati. Kondisi lahir mati yaitu kondisi dimana bayi yang baru dilahirkan tapi tidak berapa lama meninggal. Kematian bayi biasanya disebabkan oleh dua hal yaitu :

- ❖ Kematian bayi endogen yang umum disebut kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.
- ❖ Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah berumur satu bulan sampai menjelang umur satu tahun yang umumnya disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dari luar.

Angka kematian bayi ini berguna untuk pengembangan program kesehatan ibu dan anak. Tabel berikut menyajikan angka kematian bayi untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 4.31
Bayi Lahir Mati Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Kelahiran Hidup		Lahir Mati		% Lahir Mati
	Σ	%	Σ	%	
Kab. Sambas	10.024	11,88%	64	12,55%	6,38
Kab. Mempawah	5.537	6,56%	32	6,27%	5,78
Kab. Sanggau	7.137	8,46%	53	10,39%	7,43
Kab. Ketapang	8.019	9,51%	20	3,92%	2,49
Kab. Sintang	6.891	8,17%	43	8,43%	6,24
Kab. Kapuas Hulu	3.762	4,46%	51	10,00%	13,56
Kab. Bengkayang	4.204	4,98%	38	7,45%	9,04
Kab. Landak	6.349	7,53%	43	8,43%	6,77
Kab. Sekadau	3.055	3,62%	16	3,14%	5,24
Kab. Melawi	2.601	3,08%	43	8,43%	16,53

Kab. Kayong Utara	1.854	2,20%	18	3,53%	9,71
Kab. Kubu Raya	9.864	11,70%	31	6,08%	3,14
Kota Pontianak	11.462	13,59%	27	5,29%	2,36
Kota Singkawang	3.584	4,25%	31	6,08%	8,65
Jumlah	84.343	100%	510	100%	6,05

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2022, diolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 84.343 kelahiran hidup terdapat 510 kematian bayi dengan persentase lahir mati di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6.05 artinya dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi sebanyak 6 hingga 7 orang bayi. Kematian bayi terbesar terjadi di Kabupaten Melawi 16-17 dan Kapuas Hulu 13-14 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup sedangkan kematian bayi terkecil ada di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang yaitu sampai 3 kematian bayi dari 1.000 kelahiran hidup.

2) Angka Kematian Neonatal

Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada bayi sebelum bayi genap satu bulan. Informasi Angka Kematian Neonatal ini berguna untuk pengembangan program-program pelayanan kesehatan ibu saat hamil, karena kematian neonatal ini disebabkan faktor endogen yang berhubungan dengan kondisi pada waktu kehamilan. Angka Kematian Neonatal disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.32
Angka Kematian Neonatal/NNDR Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Neonatal		AK Neonatal
	Σ	%	Σ	%	
Kab. Sambas	10.024	11,88%	45	9,85%	4,49
Kab. Mempawah	5.537	6,56%	23	5,03%	4,15
Kab. Sanggau	7.137	8,46%	44	9,63%	6,17
Kab. Ketapang	8.019	9,51%	78	17,07%	9,73
Kab. Sintang	6.891	8,17%	54	11,82%	7,84
Kab. Kapuas Hulu	3.762	4,46%	35	7,66%	9,30
Kab. Bengkayang	4.204	4,98%	37	8,10%	8,80
Kab. Landak	6.349	7,53%	28	6,13%	4,41
Kab. Sekadau	3.055	3,62%	15	3,28%	4,91

Kab. Melawi	2.601	3,08%	18	3,94%	6,92
Kab. Kayong Utara	1.854	2,20%	16	3,50%	8,63
Kab. Kubu Raya	9.864	11,70%	22	4,81%	2,23
Kota Pontianak	11.462	13,59%	23	5,03%	2,01
Kota Singkawang	3.584	4,25%	19	4,16%	5,30
Jumlah	84.343	100%	457	100%	5,42

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2022, diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 84.343 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di seluruh kabupaten/kota di bawah 1 (satu) bulan atau kematian neonatal sebanyak 457 bayi. Ini menunjukkan bahwa Angka Kematian Neonatal di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 5,42 yang artinya bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di bawah usia 1 (satu) bulan sebanyak 6 bayi. Angka Kematian Neonatal terbesar berada di Kabupaten Ketapang yaitu 9,73 yang artinya bahwa dari 1.000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi di bawah usia 1 (satu) bulan sebanyak 9-10 bayi.

Angka kematian yang paling kecil adalah Kota Pontianak yaitu sebanyak 2,01 yang artinya terjadi kematian 2 (dua) orang bayi dalam 1 (satu) tahunnya untuk 1.000 kelahiran hidup. Adapun sebab-sebab kematian pada kelompok neonatal ini umumnya dikarenakan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, tetanus neonaturum, sepsis, kelainan kongenital masalah ikterus dan disebabkan oleh hal-hal lainnya. Secara jelas kematian neonatal di masing-masing kabupaten di Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.33
Penyebab Kematian Neonatal Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Sebab Kematian Neonatal							
	BBLR dan Prematuritas	ASFIKSIA	Tetanus Neonaturum	Infeksi	Kelainan Kongenital	Covid-19	Kelainan Cardio-Vaskular dan Respiratori	Lain-lain
Kab. Sambas	15	11	0	1	5	0	0	13
Kab. Mempawah	4	6	0	0	5	0	0	8
Kab. Sanggau	21	11	0	3	2	0	0	7

Kab. Ketapang	25	22	0	5	3	0	0	23
Kab. Sintang	0	22	0	3	1	0	0	28
Kab. Kapuas Hulu	10	9	0	3	7	0	0	6
Kab. Bengkayang	12	10	1	1	3	1	0	9
Kab. Landak	9	5	0	2	7	0	0	5
Kab. Sekadau	3	4	0	1	0	0	0	7
Kab. Melawi	4	3	0	2	1	0	0	8
Kab. Kayong Utara	6	7	0	1	0	0	0	2
Kab. Kubu Raya	8	10	1	0	2	0	0	1
Kota Pontianak	13	4	0	1	4	1	0	0
Kota Singkawang	8	4	0	0	2	0	0	5
Jumlah	138	128	2	23	42	2	0	122

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2022, diolah

Pada tabel di atas jelas terlihat bahwa kematian pada neonatal banyak disebabkan oleh BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) sebanyak 138 kasus. Asfeksia 128 kasus dan penyebab lainnya yang disebabkan karena tetanus neonaturum, sepsis dan kelainan kongenital. Kasus kematian yang terjadi di Kalbar yang disebabkan karena faktor lain-lain terjadi sebanyak 122 kasus.

Dari kasus-kasus yang terjadi tersebut di atas dapat diketahui bahwa kondisi di Kalbar masih banyak masyarakat yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan menyebabkan banyak bayi lahir dalam keadaan kekurangan gizi dan gizi buruk yang mengakibatkan banyaknya kematian yang disebabkan berat bayi tidak memenuhi standar.

3) Angka Kematian Post Neonatal

Kematian Post Neonatal (Post Neo-Natal Death Rate) adalah kematian yang terjadi pada bayi berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka Kematian Post Neo-Natal disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.34
Angka Kematian Post Neo-Natal

Kabupaten / Kota	Kelahiran Hidup		Kematian Post Neonatal		AK Post Neo-Natal
	Σ	%	Σ	%	
Kab. Sambas	10.024	11,88%	13	9,56%	1,30
Kab. Mempawah	5.537	6,56%	15	11,03%	2,71
Kab. Sanggau	7.137	8,46%	9	6,62%	1,26
Kab. Ketapang	8.019	9,51%	11	8,09%	1,37

Kab. Sintang	6.891	8,17%	17	12,50%	2,47
Kab. Kapuas Hulu	3.762	4,46%	16	11,76%	4,25
Kab. Bengkayang	4.204	4,98%	10	7,35%	2,38
Kab. Landak	6.349	7,53%	6	4,41%	0,95
Kab. Sekadau	3.055	3,62%	1	0,74%	0,33
Kab. Melawi	2.601	3,08%	14	10,29%	5,38
Kab. Kayong Utara	1.854	2,20%	6	4,41%	3,24
Kab. Kubu Raya	9.864	11,70%	6	4,41%	0,61
Kota Pontianak	11.462	13,59%	1	0,74%	0,09
Kota Singkawang	3.584	4,25%	11	8,09%	3,07
Jumlah	84.343	100%	136	100%	1,61

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalbar tahun 2022. diolah

Pada tabel di atas diketahui bahwa di Provinsi Kalimantan Barat dari 84.343 kelahiran hidup, terdapat 1 sampai 2 yang meninggal pada umur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun. Angka kematian post neonatal terbesar berada di Kabupaten Melawi yaitu 5,38 yang artinya bahwa dari 1000 kelahiran hidup terjadi kematian bayi umur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun sebanyak antara 5 sampai 6 bayi.

Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat penyebab kematian Post Neonatal kebanyakan disebabkan oleh antara lain Pneumonia, Diare dan kelainan saluran cerna dan banyak juga oleh sebab lain-lain yang terjadi.

4) Angka Kematian Anak dan Balita

Anak adalah penduduk yang berumur 1 sampai menjelang 5 tahun atau tepatnya 1 tahun sampai dengan 4 tahun 11 bulan 29 hari. Sedangkan Balita adalah semua anak termasuk bayi yang baru berumur 0 sampai menjelang tepat 5 tahun. Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu. Adapun angka kematian balita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagai mana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.35
Angka Kematian Balita

Kabupaten / Kota	Penduduk Usia < 5 (0-4 Th)		Kematian Balita < 5 (0-4 Th)		Angka Kematian Balita
	n (jiwa)	%	n (jiwa)*	%	
Kab. Sambas	47.122	11,40%	60	9,46%	1,27
Kab. Mempawah	23.606	5,71%	43	6,78%	1,82
Kab. Sanggau	33.249	8,04%	53	8,36%	1,59
Kab. Ketapang	41.163	9,96%	89	14,04%	2,16
Kab. Sintang	33.081	8,00%	82	12,93%	2,48
Kab. Kapuas Hulu	18.669	4,52%	55	8,68%	2,95
Kab. Bengkayang	21.873	5,29%	52	8,20%	2,38
Kab. Landak	32.880	7,95%	38	5,99%	1,16
Kab. Sekadau	15.421	3,73%	17	2,68%	1,10
Kab. Melawi	15.374	3,72%	32	5,05%	2,08
Kab. Kayong Utara	9.738	2,36%	23	3,63%	2,36
Kab. Kubu Raya	51.452	12,44%	30	4,73%	0,58
Kota Pontianak	50.037	12,10%	25	3,94%	0,50
Kota Singkawang	19.795	4,79%	35	5,52%	1,77
Jumlah	413.460	100%	634	100%	1,53

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
*Dinas Kesehatan Prov. Kalbar. Tahun 2022 diolah**

Dari tabel tersebut dapat diketahui Angka Kematian Balita (AKABA) 1.53 % yang artinya bahwa pada tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Barat dari 1.000 balita terjadi hampir 2 kematian balita. Angka Kematian Balita tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu 2.95% yang artinya dari 1.000 balita terjadi 2-3 kematian balita.

Angka Kematian Balita ini diduga akan tinggi bila terjadi keadaan kasus kekurangan gizi atau gizi buruk, tingkat kebersihan lingkungan rendah, tingginya prevalensi penyakit menular pada balita atau kecelakaan yang terjadi di dalam atau di sekitar rumah.

5) Angka Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian perempuan yang disebabkan kehamilan, persalinan dan nifas (pasca melahirkan) bukan disebabkan oleh hal-hal lain seperti penyakit maupun kecelakaan.

Untuk menghitung angka kematian ibu secara langsung dibutuhkan data ibu yang meninggal karena sebab-sebab kehamilan, persalinan dan nifas serta jumlah bayi yang dilahirkan

dalam kurun waktu tertentu. Jumlah ibu yang meninggal karena sebab-sebab di atas cukup sulit untuk diperoleh mengingat bahwa pelaporan kematian seringkali tidak disertai dengan penyebab kematian. Selain itu masyarakat seringkali tidak memahami penyebab kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan nifas. Oleh sebab itu dalam perhitungan kematian ibu biasanya dilakukan dengan perhitungan tidak langsung. Kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.36
Kematian Ibu/Maternal Mortality Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Jumlah Lahir Hidup	Kematian Ibu Maternal										AKI
		Pen darahan	Gangguan Hiper Tensi	In feksi	Kelai- nan Jantung Dan Pem buluh Darah	Gang guan Auto Immun	Gang guan Cereb rova Skular	Covid- 19	Kompli kasi Pasca Keguguran (Abor tus)	Lain- Lain	Σ	
Kab. Sambas	10.024	0	5	0	4	0	0	0	0	1	10	99,76
Kab. Mempawah	5.537	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	72,24
Kab. Sanggau	7.137	3	2	2	1	0	0	0	0	4	12	168,14
Kab. Ketapang	8.019	4	2	0	0	0	0	0	0	2	8	99,76
Kab. Sintang	6.891	5	1	2	0	0	0	0	0	2	10	145,12
Kab. Kapuas Hulu	3.762	2	0	0	2	0	0	0	0	2	6	159,49
Kab. Bengkayang	4.204	5	1	0	0	0	0	0	0	5	11	261,66
Kab. Landak	6.349	1	2	0	1	0	0	0	0	3	7	110,25
Kab. Sekadau	3.055	5	2	0	0	0	0	0	0	1	8	261,87
Kab. Melawi	2.601	3	1	1	0	0	0	1	0	2	8	307,57
Kab. Kayong Utara	1.854	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4	215,75
Kab. Kubu Raya	9.864	2	3	1	0	0	0	0	0	4	10	101,38
Kota Pontianak	11.462	4	6	0	4	0	0	2	0	2	18	157,04
Kota Singkawang	3.584	2	1	0	0	0	0	0	0	1	4	111,61
Jumlah	84.343	37	28	6	15	0	0	4	0	30	120	142,28

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalbar. Tahun 2022, diolah

$$\text{AKI} = \frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times K$$

Dimana:

Jumlah Kematian Ibu yang dimaksud adalah banyaknya kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan sampai 42 hari setelah melahirkan, pada tahun tertentu, di daerah tertentu.

Jumlah kelahiran Hidup adalah banyaknya bayi yang lahir hidup pada tahun tertentu, di daerah tertentu.

Konstanta =100.000 bayi lahir hidup.

Sumber : datastatistik-indonesia.com

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa angka kematian ibu di Provinsi Kalimantan Barat yang tercatat selama tahun 2022 sebesar 142,28 yang artinya bahwa dari 100.000 kelahiran hidup terjadi kematian ibu sebanyak 120 kematian ibu pada saat kehamilan, persalinan dan pasca persalinan. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota kematian Ibu tertinggi berada di Kabupaten Melawi yaitu 307,57 yang artinya terdapat 8 orang ibu meninggal dari 2.601 kelahiran hidup.

2. Pendidikan

a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH berguna untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dari berbagai media, sehingga AMH ini dapat mencerminkan potensi perkembangan intelektual penduduk sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah angka melek huruf (AMH) Kalimantan Barat Tahun 2022 sebesar 93,96%.

b) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun umurnya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur sekolah yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang Pendidikan seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.37
Angka Partisipasi Kasar /Gross Enrollment Ratio Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa*	Jumlah Penduduk	APK
Pra Sekolah/School TK / Pre-primary	-	196.649	-
SD/Primary School	626.979	617.803	101,485%
SLTP/Junior SS	274.945	295.635	93,002%
SLTA/Senior SS	229.622	275.976	83,204%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*
** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar. Diolah*
** Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar. Diolah*

Keterangan:

1. TK/ Pre-Primary: Seluruh siswa TK
Pre-Primary School level : penduduk berumur 5-6 tahun
2. Tk.SD(SD+MI) : Seluruh siswa SD
Primary School level (PS+Islamic PS):penduduk berumur 7-12 tahun
3. Tk.SMP (SMP+MTs): Seluruh siswa SMP
Junior SS level (JSS+Islamic JSS) : penduduk berumur 13 - 15 tahun
4. Tk.SM (SM+MA) : Seluruh siswa SMA sederajat
Senior SS level (SSS + Islamic SSS) : penduduk berumur 16 -18 tahun

Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar datanya tidak bisa diolah dikarenakan tidak adanya data siswa jenjang Pendidikan TK/PAUD, sedangkan untuk APK SD/Sederajat sebesar 101.485 persen. APK SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4.38 di bawah ini :

Tabel 4.38
APK SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Jmlh Murid SD*	Jmlh Pddk 7 - 12 Th	APK SD
1	Kab. Sambas	74.708	73.858	101,15%
2	Kab. Mempawah	33.199	32.870	101,00%
3	Kab. Sanggau	53.571	52.272	102,49%
4	Kab. Ketapang	63.431	61.162	103,71%
5	Kab. Sintang	55.204	51.967	106,23%
6	Kab. Kapuas Hulu	31.310	29.517	106,07%
7	Kab. Bengkayang	34.197	33.173	103,09%
8	Kab. Landak	45.568	46.966	97,02%
9	Kab. Sekadau	25.326	24.738	102,38%
10	Kab. Melawi	24.636	23.761	103,68%
11	Kab. Kayong Utara	13.675	13.992	97,73%
12	Kab. Kubu Raya	72.668	71.672	101,39%
13	Kota Pontianak	71.148	73.724	96,51%
14	Kota Singkawang	28.338	28.131	100,74%
Jumlah		626.979	617.803	101,49%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*
** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar. Diolah*
** Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar. Diolah*

Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/ sederajat masih tinggi karena masih terdapat anak umur di atas 12 tahun yang masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat atau sebaliknya ada siswa yang berumur di bawah 7 tahun sudah masuk SD. Untuk mengetahui APK SMP dan SMA di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disajikan pada tabel 4.39 di bawah ini :

Tabel 4.39
APK SMP - SMA Kabupaten/Kota Tahun se Kalimantan Barat 2022

Kabupaten/Kota	Jmlh Murid SMP*	Jmlh Pddk 13 - 15 Th	APK SMP	Jmlh Murid SMA/SMK*	Jmlh Pddk 16-18 Th	APK SMA
Kab. Sambas	33.130	36.466	90,85%	23.955	34.122	70,20%
Kab. Mempawah	14.465	15.741	91,89%	11.760	15.894	73,99%
Kab. Sanggau	21.381	25.557	83,66%	16.801	25.165	66,76%
Kab. Ketapang	26.272	30.880	85,08%	20.300	31.837	63,76%
Kab. Sintang	23.013	21.007	109,55%	19.028	18.604	102,28%
Kab. Kapuas Hulu	13.485	14.864	90,72%	10.344	11.712	88,32%
Kab. Bengkayang	15.047	16.316	92,22%	11.581	16.173	71,61%
Kab. Landak	20.356	21.958	92,70%	17.861	22.026	81,09%
Kab. Sekadau	10.298	11.638	88,49%	8.556	10.509	81,42%
Kab. Melawi	10.398	11.265	92,30%	9.038	11.189	80,78%
Kab. Kayong Utara	6.034	7.439	81,11%	5.277	7.718	68,37%

Kab. Kubu Raya	33.027	33.762	97,82%	25.520	24.747	103,12%
Kota Pontianak	34.397	35.510	96,87%	36.809	34.167	107,73%
Kota Singkawang	13.642	13.232	103,10%	12.792	12.113	105,61%
Jumlah	274.945	295.635	93,00%	229.622	275.976	83,20%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar. Diolah*

** Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalbar. Diolah*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMP/SLTP/ sederajat sebesar 93,00 persen dan Angka Partisipasi Kasar jenjang pendidikan SMA/SLTA/ sederajat sebesar 83,20 persen.

c) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa pada kelompok umur sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM ini merupakan indikator yang menunjukkan daya serap penduduk umur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan yang lebih baik dari APK karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok umur standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Nilai APM lebih rendah dari nilai APK. karena umur yang dihitung pada jenjang pendidikan berdasarkan umur dalam kategori pendidikan tertentu. seperti tabel 4.40 berikut ini

Tabel 4.40

APM SD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Murid SD Usia 7-12 Th*	Jmlh Pddk 7 - 12 Th	APM SD
1	Kab. Sambas	72.765	73.858	98,52%
2	Kab. Mempawah	32.492	32.870	98,85%
3	Kab. Sanggau	50.798	52.272	97,18%
4	Kab. Ketapang	59.437	61.162	97,18%
5	Kab. Sintang	50.922	51.967	97,99%
6	Kab. Kapuas Hulu	29.394	29.517	99,58%
7	Kab. Bengkayang	32.257	33.173	97,24%
8	Kab. Landak	45.214	46.966	96,27%
9	Kab. Sekadau	24.303	24.738	98,24%
10	Kab. Melawi	22.746	23.761	95,73%

11	Kab. Kayong Utara	13.764	13.992	98,37%
12	Kab. Kubu Raya	69.959	71.672	97,61%
13	Kota Pontianak	70.723	73.724	95,93%
14	Kota Singkawang	27.706	28.131	98,49%
Jumlah		602.482	617.803	97,52%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
* Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Kalbar. Diolah*

Untuk APM TK/PAUD tidak dapat dihitung dikarenakan tidak adanya data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat sedangkan rata-rata Angka Partisipasi Murni kabupaten/kota tingkat SD sebesar 97,52%. APM tingkat SD tertinggi terdapat di Kabupaten BKapuas Hulu yaitu 99,58% dan yang terkecil di Kabupaten Sanggau yaitu 97,16%. Untuk Angka Partisipasi Murni jenjang pendidikan SMP/SLTP dan SMA/SMK sebagaimana disajikan pada tabel 4.41 berikut ini.

Tabel 4.41
APM SMP – SMA Kabupaten/Kota Tahun se Kalimantan Barat 2022

Kabupaten/Kota	Murid Usia 13–15 Th*	Pddk Usia 13–15 Th	APM SMP	Murid Usia 16–18 Th*	Pddk Usia 16–18 Th	APM SMA
Sambas	23.335	36.466	63,99%	16.556	34.122	48,52%
Mempawah	9.144	15.741	58,09%	8.561	15.894	53,86%
Sanggau	18.299	25.557	71,60%	11.770	25.165	46,77%
Ketapang	22.110	30.880	71,60%	14.890	31.837	46,77%
Sintang	11.947	21.007	56,87%	8.437	18.604	45,35%
Kapuas Hulu	9.213	14.864	61,98%	5.767	11.712	49,24%
Bengkayang	10.020	16.316	61,41%	8.175	16.173	50,55%
Landak	14.404	21.958	65,60%	13.286	22.026	60,32%
Sekadau	7.651	11.638	65,74%	5.045	10.509	48,01%
Melawi	7.313	11.265	64,92%	4.859	11.189	43,43%
Kayong Utara	6.055	7.439	81,40%	4.365	7.718	56,55%
Kubu Raya	27.057	33.762	80,14%	13.175	24.747	53,24%
Kota Pontianak	25.649	35.510	72,23%	21.050	34.167	61,61%
Kota Singkawang	9.781	13.232	73,92%	7.212	12.113	59,54%
Jumlah	201.977	295.635	68,32%	143.149	275.976	51,87%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar
* Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Kalbar. Diolah*

Perhitungan Angka Partisipasi Murni ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk yang murni di suatu tingkat pendidikan dan Angka Partisipasi Murni merupakan indikator untuk mengukur daya

serap penduduk umur sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan seperti yang terdapat pada tabel berikut ini. Pada tabel 4.42 menjelaskan bahwa Angka Partisipasi Murni jenjang SMP/SLTP sebesar 68,32% sedangkan Angka Partisipasi Murni jenjang SMA/SLTA sebesar 51,87%.

Tabel 4.42
Angka Partisipasi Murni/Net Enrollment Ratio Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa*	Jumlah Penduduk	APM
Tk.SD/ <i>Primary School level</i>	602.482	617.803	97,52%
Tk.SLTP/ <i>Junior SS level</i>	201.977	295.635	68,32%
Tk.SLTA/ <i>Senior SS level</i>	143.149	275.976	51,87%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*
** Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota se Kalbar. Diolah*

Keterangan:

1. Tk.SD(SD+MI) : Seluruh siswa SD
Primary School level (PS+Islamic PS):penduduk berumur 7-12 tahun
2. Tk.SMP (SMP+MTs): Seluruh siswa SMP
Junior SS level (JSS+Islamic JSS) : penduduk berumur 13 - 15 tahun
3. Tk.SM (SM+MA) : Seluruh siswa SMA sederajat
Senior SS level (SSS + Islamic SSS) : penduduk berumur 16 -18 tahun

d) Angka Penduduk Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan tertentu dapat diketahui melalui jumlah murid yang putus sekolah pada jenjang Pendidikan, namun Angka Putus Sekolah tidak dapat disajikan karena data tidak tersedia.

3. Ekonomi

a) Proporsi dan Jumlah Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

1) Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja

Angkatan Kerja (*labor force*) adalah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau yang terlibat dan berusaha terlibat dalam kegiatan produktif (Tidak termasuk Ibu Rumah Tangga, Pelajar, Mahasiswa, Pensiunan, Cacat

Mental dan Cacat Fisik dan Mental). Proporsi Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dapat di sajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.43
Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
15-19 tahun	113.551	7,02%	101.208	16,29%	214.759	9,59%
20-24 tahun	109.010	6,74%	61.979	9,98%	170.989	7,63%
25-29 tahun	161.329	9,97%	60.104	9,68%	221.433	9,89%
30-34 tahun	208.688	12,89%	72.500	11,67%	281.188	12,55%
35-39 tahun	227.399	14,05%	75.384	12,14%	302.783	13,52%
40-44 tahun	227.873	14,08%	68.278	10,99%	296.151	13,22%
45-49 tahun	189.272	11,69%	56.523	9,510%	245.795	10,97%
50-54 tahun	162.233	10,02%	47.559	7,66%	209.792	9,37%
55-59 tahun	123.390	7,62%	41.855	6,74%	165.245	7,38%
60-64 tahun	95.802	5,92%	35.790	5,76%	131.592	5,88%
Total	1.618.547	100%	621.180	100%	2.239.727	100%
Jlh.Pddk Kalbar	2.826.287		2.670.864		5.497.151	
Persentase (%)	57,27%		23,26%		40,74%	

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

Apabila dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa persentase angkatan kerja tertinggi berada pada kelompok umur 35-39 tahun. Proporsi Angkatan kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat disajikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.44
Proporsi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Kab. Sambas	190.172	11,75%	123.977	19,96%	314.149	14,03%
Kab. Mempawah	88.052	5,44%	25.338	4,08%	113.390	5,06%
Kab. Sanggau	151.023	9,33%	54.518	8,78%	205.541	9,18%
Kab. Ketapang	178.815	11,05%	44.826	7,22%	223.641	9,99%
Kab. Sintang	131.960	8,15%	48.189	7,76%	180.149	8,04%
Kab. Kapuas Hulu	80.239	4,96%	34.098	5,49%	114.337	5,10%
Kab. Bengkayang	82.432	5,09%	28.532	4,59%	110.964	4,95%
Kab. Landak	120.290	7,43%	44.290	7,13%	164.580	7,35%
Kab. Sekadau	65.887	4,07%	32.944	5,30%	98.831	4,41%
Kab. Melawi	65.038	4,02%	22.116	3,56%	87.154	3,89%
Kab. Kayong Utara	38.153	2,36%	9.788	1,58%	47.941	2,14%
Kab. Kubu Raya	173.887	10,74%	45.567	7,34%	219.454	9,80%
Kota Pontianak	187.510	11,59%	83.756	13,48%	271.266	12,11%
Kota Singkawang	65.089	4,02%	23.241	3,74%	88.330	3,94%
Total	1.618.547	100%	621.180	100%	2.239.727	100%
Jlh.Pddk Usia Kerja	1.989.068		1.877.075		3.866.143	
Persentase	81,37%		33,09%		57,93%	

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebesar 2.239.727 orang (57,93 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin penduduk usia kerja laki-laki yang memasuki pasar kerja lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia kerja perempuan yaitu mencapai 81,37 persen.

Apabila dilihat dari wilayah kabupaten/kota, persentase angkatan kerja tertinggi berada di Kabupaten Sambas yaitu 14,03 persen diikuti Kota Pontianak 12,11 persen, Kabupaten Ketapang 9,99 persen dan Kabupaten Kubu Raya 9,80 persen. Sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Kayong utara 2,14 persen dan diikuti Kabupaten Melawi 3,89 persen, Kota Singkawang 3,94 persen dan Kabupaten Sekadau 4,41 persen.

2) Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur

a. Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Angka partisipasi angkatan kerja adalah yang menggambarkan banyaknya angkatan kerja, yaitu penduduk yang sedang bekerja dan yang mencari pekerjaan dari penduduk usia 15-64 tahun terhadap penduduk usia 15-64 tahun. Indikator ini untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu.

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Provinsi Kalimantan Barat dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.45
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

Kelompok Umur	Angkatan Kerja			Penduduk 15-64 Tahun (Tenaga Kerja)			Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)		
	Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total	Lk (%)	Pr (%)	Total (%)
15-19 tahun	113.551	101.208	214.759	241.601	228.775	470.376	47,00%	44,24%	45,66%
20-24 tahun	109.010	61.979	170.989	259.195	247.677	506.872	42,06%	25,02%	33,73%
25-29 tahun	161.329	60.104	221.433	233.464	218.861	452.325	69,10%	27,46%	48,95%
30-34 tahun	208.688	72.500	281.188	226.525	214.408	440.933	92,13%	33,81%	63,77%
35-40 tahun	227.399	75.384	302.783	229.174	216.187	445.361	99,23%	34,87%	67,99%
40-44 tahun	227.873	68.278	296.151	228.189	212.172	440.361	99,86%	32,18%	67,25%
45-49 tahun	189.272	56.523	245.795	189.381	178.020	367.401	99,94%	31,75%	66,90%
50-54 tahun	162.233	47.559	209.792	162.289	148.877	311.166	99,97%	31,95%	67,42%
55-59 tahun	123.390	41.855	165.245	123.428	117.657	241.085	99,97%	35,57%	68,54%
60-64 tahun	95.802	35.790	131.592	95.822	94.441	190.263	99,98%	37,90%	69,16%
Jumlah	1.618.547	621.180	2.239.727	1.989.068	1.877.075	3.866.143	81,37%	33,09%	57,93%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 57,93 persen dari angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Barat telah berpartisipasi dalam pasar kerja. Partisipasi angkatan kerja penduduk perempuan lebih rendah (33,09%) apabila dibandingkan partisipasi angkatan kerja penduduk laki-laki sebesar (81,37%).

Selanjutnya untuk melihat kualitas sumber daya manusia khususnya angkatan kerja, salah satunya dapat ditinjau dari tingkat pendidikan formal tertinggi yang ditamatkan. Karena hal ini dapat menggambarkan kualitas angkatan kerja dengan melihat mayoritas pendidikan angkatan kerja tersebut. Jika angkatan kerja memiliki pendidikan yang cukup tinggi maka akan memudahkan angkatan kerja tersebut untuk masuk ke pasar kerja.

Pada tabel dibawah ini disajikan proporsi angkatan kerja menurut pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4.46
Proporsi Angkatan Kerja Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
Tidak/Belum Sekolah	155.885	9,63%	113.295	18,24%	269.180	12,02%
Belum Tamat SD/Sederajat	123.136	7,61%	54.908	8,84%	178.044	7,95%
Tamat SD/Sederajat	547.736	33,84%	182.260	29,34%	729.996	32,59%
SLTP/Sederajat	279.570	17,27%	72.382	11,65%	351.952	15,71%
SLTA/Sederajat	394.578	24,38%	103.374	16,64%	497.952	22,23%
Diploma I/II	8.505	0,53%	7.168	1,15%	15.673	0,70%
Akademi/Diploma III/S.Muda	24.211	1,50%	23.663	3,81%	47.874	2,14%
Diploma IV/Strata I	78.659	4,86%	60.757	9,78%	139.416	6,22%
Strata II	5.978	0,37%	3.250	0,52%	9.228	0,41%
Strata III	289	0,02%	123	0,02%	412	0,02%
Jumlah	1.618.547	100%	621.180	100%	2.239.727	100%

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi jenjang pendidikan penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Barat paling banyak adalah tamatan SD/sejerajat yaitu sebesar 729.996 orang (32,59 persen) sedangkan yang paling sedikit adalah tamatan Strata III sebanyak 412 orang (0,02 persen).

b. Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Berdasarkan database SIAK dan sesuai dengan formulir F1.01 (pendaftaran penduduk) jenis pekerjaan sebagaimana table berikut ini.

Tabel 4.47
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	816.502	725.694	1.542.196
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	442	1.040.783	1.041.225
3	PELAJAR/MAHASISWA	478.931	408.042	886.973
4	PENSIUNAN	16.264	5.168	21.432
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	44.432	38.171	82.603

6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	10.526	150	10.676
7	KEPOLISIAN RI	10.040	586	10.626
8	PERDAGANGAN	6.758	1.693	8.451
9	PETANI/PEKEBUN	621.972	266.203	888.175
10	PETERNAK	492	95	587
11	NELAYAN/PERIKANAN	28.037	707	28.744
12	INDUSTRI	508	174	682
13	KONSTRUKSI	776	41	817
14	TRANSPORTASI	885	20	905
15	KARYAWAN SWASTA	254.873	55.260	310.133
16	KARYAWAN BUMN	7.597	2.620	10.217
17	KARYAWAN BUMD	1.359	462	1.821
18	KARYAWAN HONORER	11.809	14.107	25.916
19	BURUH HARIAN LEPAS	69.776	2.459	72.235
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	23.729	5.888	29.617
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	1.716	43	1.759
22	BURUH PETERNAKAN	209	69	278
23	PEMBANTU RUMAH TANGGA	40	1.806	1.846
24	TUKANG CUKUR	149	9	158
25	TUKANG LISTRIK	236	0	236
26	TUKANG BATU	362	5	367
27	TUKANG KAYU	4.956	4	4.960
28	TUKANG SOL SEPATU	59	6	65
29	TUKANG LAS/PANDAI BESI	623	1	624
30	TUKANG JAHIT	426	420	846
31	TUKANG GIGI	38	4	42
32	PENATA RIAS	32	103	135
33	PENATA BUSANA	8	12	20
34	PENATA RAMBUT	102	146	248
35	MEKANIK	2.323	5	2.328
36	SENIMAN	152	19	171
37	TABIB	52	10	62
38	PARAJI	287	60	347

39	PERANCANG BUSANA	1	16	17
40	PENTERJEMAH	6	5	11
41	IMAM MESJID	109	0	109
42	PENDETA	1.840	207	2.047
43	PASTOR	257	0	257
44	WARTAWAN	178	17	195
45	USTADZ/MUBALIGH	352	24	376
46	JURU MASAK	55	74	129
47	PROMOTOR ACARA	2	2	4
48	ANGGOTA DPR-RI	4	2	6
49	ANGGOTA DPD	0	2	2
50	ANGGOTA BPK	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0
53	ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN	0	0	0
55	DUTA BESAR	1	0	1
56	GUBERNUR	1	0	1
57	WAKIL GUBERNUR	1	0	1
58	BUPATI	8	2	10
59	WAKIL BUPATI	10	0	10
60	WALIKOTA	1	0	1
61	WAKIL WALIKOTA	1	0	1
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	26	8	34
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	297	56	353
64	DOSEN	1.205	967	2.172
65	GURU	7.598	12.232	19.830
66	PILOT	2	1	3
67	PENGACARA	157	32	189
68	NOTARIS	84	57	141
69	ARSITEK	78	15	93
70	AKUNTAN	11	8	19
71	KONSULTAN	281	43	324

72	DOKTER	649	790	1.439
73	BIDAN	0	2.659	2.659
74	PERAWAT	1.385	2.591	3.976
75	APOTEKER	59	197	256
76	PSIKIATER/PSIKOLOG	4	11	15
77	PENYIAR TELEVISI	2	1	3
78	PENYIAR RADIO	16	13	29
79	PELAUT	414	2	416
80	PENELITI	65	16	81
81	SOPIR	6.010	5	6.015
82	PIALANG	22	7	29
83	PARANORMAL	22	5	27
84	PEDAGANG	8.732	1.966	10.698
85	PERANGKAT DESA	3.370	821	4.191
86	KEPALA DESA	758	16	774
87	BIARAWAN/BIARAWATI	25	534	559
88	WIRASWASTA	369.967	75.707	445.674
89	ANGGOTA LEMB. TINGGI LAINNYA	4.667	691	5.358
90	ARTIS	0	0	0
91	ATLIT	0	1	1
92	CHEFF	0	0	0
93	MANAJER	0	0	0
94	TENAGA TATA USAHA	0	0	0
95	OPERATOR	2	0	2
96	PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN	0	0	0
97	TEKNISI	3	0	3
98	ASISTEN AHLI	0	0	0
99	PEKERJAAN LAINNYA	71	16	87
JUMLAH		2.826.287	2.670.864	5.497.151

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

Untuk lebih memudahkan pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan maka jumlah dan proporsi penduduk

menurut jenis pekerjaan dapat di sederhanakan sebagai berikut.

Tabel 4.48
Jumlah dan Proporsi Penduduk
Menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin				Jumlah	
		Laki-Laki		Perempuan			
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	Belum / Tidak Bekerja	816.502	28,89%	725.694	27,17%	1.542.196	28,05%
2	Mengurus Rumah Tangga	442	0,02%	1.040.783	38,97%	1.041.225	18,94%
3	Pelajar / Mahasiswa	478.931	16,95%	408.042	15,28%	886.973	16,14%
4	PNS	44.432	1,57%	38.171	1,43%	82.603	1,50%
5	TNI	10.526	0,37%	150	0,01%	10.676	0,19%
6	POLRI	10.040	0,36%	586	0,02%	10.626	0,19%
7	Pensiunan	16.264	0,58%	5.168	0,19%	21.432	0,39%
8	Bekerja / Lainnya	1.449.150	51,27%	452.270	16,93%	1.901.420	34,59%
Jumlah		2.826.287	100%	2.670.864	100%	5.497.152	100%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

c. Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik yang belum pernah bekerja maupun yang sudah pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Adapun tingkat pengangguran menurut struktur umur di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.49
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kelompok Umur	Angkatan Kerja		Jumlah	
	Bekerja	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	% Angkatan Kerja
15-19 tahun	5.242	209.517	214.759	97,56%
20-24 tahun	67.864	103.125	170.989	60,31%
25-29 tahun	173.514	47.919	221.433	21,64%
30-34 tahun	256.524	24.664	281.188	8,77%
35-34 tahun	289.307	13.476	302.783	4,45%
40-44 tahun	289.037	7.114	296.151	2,40%
45-49 tahun	242.303	3.492	245.795	1,42%
50-54 tahun	207.400	2.392	209.792	1,14%
55-59 tahun	163.540	1.705	165.245	1,03%
60-64 tahun	129.990	1.602	131.592	1,22%
KALBAR	1.824.721	415.006	2.239.727	18,53%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 18,53 persen. Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka akan semakin besar potensi kerawanan sosial dalam masyarakat.

Apabila dilihat dari struktur umur, angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat terbanyak pada kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 214.759 (97,56 persen). Penduduk kelompok umur 15-19 tahun ini seharusnya masih duduk di bangku pendidikan belum masuk ke pasar kerja. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh

pendidikan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengangguran pada kelompok umur muda ini harus ditangani dengan baik dengan memberikan bekal keterampilan khusus melalui Balai Latihan Kerja (BLK) maupun training-training sesuai permintaan pasar sehingga mereka dapat terserap di pasar kerja.

Selanjutnya untuk mengetahui angka pengangguran terbuka pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 4.50.

Tabel 4.50
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Angkatan Kerja		Jumlah	
	Bekerja	Pencari Kerja	Angkatan Kerja	% Angkatan Kerja
Kab. Sambas	289.690	24.459	314.149	7,79%
Kab. Mempawah	82.139	31.251	113.390	27,56%
Kab. Sanggau	178.444	27.097	205.541	13,18%
Kab. Ketapang	177.955	45.686	223.641	20,43%
Kab. Sintang	143.985	36.164	180.149	20,07%
Kab. Kapuas Hulu	107.904	6.433	114.337	5,63%
Kab. Bengkayang	96.610	14.354	110.964	12,94%
Kab. Landak	123.047	41.533	164.580	25,24%
Kab. Sekadau	83.990	14.841	98.831	15,02%
Kab. Melawi	68.054	19.100	87.154	21,92%
Kab. Kayong Utara	36.562	11.379	47.941	23,74%
Kab. Kubu Raya	169.735	49.719	219.454	22,66%
Kota Pontianak	194.242	77.024	271.266	28,39%
Kota Singkawang	72.364	15.966	88.330	18,08%
KALBAR	1.824.721	415.006	2.239.727	18,53%

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas terlihat bahwa angka pengangguran tertinggi terdapat di Kota Pontianak yaitu sebesar 28,39 persen, sedangkan yang angka pengangguran terkecil terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu sebesar 5,63 persen.

4. Sosial

a) Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan merupakan keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Dampak dari kemiskinan sangat kompleks menyentuh berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Salah satu dampak dari masalah kemiskinan adalah meningkatnya jenis dan jumlah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.51
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah	%
1	Anak Balita Terlantar	49	0,005%
2	Anak Terlantar	4.045	0,398%
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	435	0,043%
4	Anak Jalanan	121	0,012%
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	1.447	0,142%
6	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan dan/atau Diperlakukan Salah	121	0,012%
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	1.284	0,126%
8	Lanjut Usia Terlantar	25.488	2,505%

9	Penyandang Disabilitas	22.742	2,235%
10	Tuna Susila	487	0,048%
11	Gelandangan	148	0,015%
12	Pengemis	380	0,037%
13	Pemulung	425	0,042%
14	Kelompok Minoritas (Waria. Gay. Lesbian)	503	0,049%
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	575	0,057%
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	4.527	0,445%
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	354	0,035%
18	Korban Trafficking	19	0,002%
19	Korban Tindak Kekerasan	300	0,029%
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	1.657	0,163%
21	Korban Bencana Alam	157.516	15,480%
22	Korban Bencana Sosial	324	0,032%
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	35.623	3,501%
24	Fakir Miskin	633.547	62,262%
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	1.497	0,147%
26	Komunitas Adat Terpencil	3.290	0,323%
27	KPM Penerima PKH	120.641	11,856%
JUMLAH		1.017.545	100%

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar Tahun 2022

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terbanyak adalah Fakir Miskin 633.547 orang (62,262 persen) dan Korban Bencana Alam sebanyak 157.516 orang (15,480 persen). Sedangkan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terkecil adalah Korban Trafficking 19 orang (0,002 persen) dan Anak Balita Terlantar sebanyak 49 orang (0,005 persen) kecilnya angka tersebut dikarenakan masih belum lengkapnya data dari kabupaten/kota hingga akhir tahun 2022.

Upaya penanganan masalah kemiskinan memerlukan berbagai strategi dalam pelaksanaannya. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan.

PSKS inilah yang bersama-sama dengan pendamping sosial akan berupaya melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan untuk itu diperlukan pemahaman mendalam para pendamping sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) khususnya dalam menyelenggarakan pendampingan kepada masyarakat. Adapun potensi dan sumber kesejahteraan sosial per kabupaten/kota dapat dilihat seperti daftar tabel di bawah ini.

Tabel 4.52
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial									Jumlah
		PSM	TKSK	LK3	SLRT	LKS	Karang Taruna	CSR	Taruna Siaga Bencana	Pelopop Perda- maian	
1	Kab. Sambas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kab. Mempawah	250	9	2	1	43	67	0	46	3	421
3	Kab. Sanggau	50	15	1	1	1	10	2	44	2	126
4	Kab. Ketapang	0	20	0	1	12	0	0	50	1	84
5	Kab. Sintang	0	14	0	1	98	10	0	25	1	149
6	Kab. Kapuas Hulu	29	6	0	1	33	10	0	146	0	225
7	Kab. Bengkayang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Landak	2	13	0	1	9	1	1	25	1	53
9	Kab. Sekadau	87	7	1	0	2	0	0	18	1	116
10	Kab. Melawi	2	12	1	0	4	36	0	26	2	83
11	Kab. Kayong Utara	43	6	0	10	3	44	2	20	1	129
12	Kab. Kubu Raya	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
13	Kota Pontianak	29	6	0	1	33	10	0	146	0	225
14	Kota Singkawang	46	5	1	1	20	26	0	25	6	130
Jumlah		538	113	6	18	258	214	5	621	18	1791

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar. Tahun 2022

b) Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Untuk mengetahui berapa besar angka kecacatan pada suatu daerah, dapat diketahui dengan menghitung jumlah penduduk yang cacat dibanding dengan jumlah penduduk. Jenis kecacatan pada

dasarnya tidak hanya merupakan kecacatan fisik tetapi juga cacat mental. dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Pada umumnya penduduk penyandang cacat ini tidak seluruhnya terdata. karena kecacatan dianggap memalukan keluarga. Berikut ini adalah angka kecacatan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Tabel 4.53
Angka Kecacatan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Penduduk Cacat		Σ Penduduk	Angka Kecacatan
	Σ	%		
Kab. Sambas	630	6,51%	640.838	0,10%
Kab. Mempawah	695	7,18%	308.771	0,23%
Kab. Sanggau	696	7,19%	490.805	0,14%
Kab. Ketapang	955	9,86%	575.817	0,17%
Kab. Sintang	737	7,61%	433.614	0,17%
Kab. Kapuas Hulu	626	6,46%	266.651	0,23%
Kab. Bengkayang	436	4,50%	290.588	0,15%
Kab. Landak	487	5,03%	405.320	0,12%
Kab. Sekadau	233	2,41%	217.468	0,11%
Kab. Melawi	210	2,17%	209.958	0,10%
Kab. Kayong Utara	199	2,06%	128.684	0,15%
Kab. Kubu Raya	1.802	18,61%	614.910	0,29%
Kota Pontianak	1.593	16,45%	673.400	0,24%
Kota Singkawang	384	3,97%	240.327	0,16%
Jumlah	9.683	100%	5.497.151	0,18%

Sumber : *Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022*
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas, dapat diinformasikan bahwa jumlah penyandang cacat di Kalbar berjumlah 9.683 jiwa dengan proporsi terbesar berada di Kabupaten Kubu Raya yaitu 18,61 persen. Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang masing-masing sebesar 16,45 persen dan 9,86 persen. Jika dilihat dari besarnya angka kecacatan dibandingkan dengan jumlah penduduk maka angka kecacatan Provinsi Kalimantan Barat adalah 0,18 persen. Meskipun angka kecacatan kecil namun perlu mendapat perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menangani para penderita cacat, termasuk memberikan peluang pendidikan, pekerjaan dan memperoleh kehidupan yang layak bagi penderita kecacatan.

Bila dilihat dari proporsi penduduk penyandang cacat per Kabupaten, Kabupaten Kubu Raya merupakan kabupaten yang mempunyai angka kecacatan tertinggi yaitu 0,29 persen kemudian Kota Pontianak yaitu 0,24 persen dan Kabupaten Mempawah sebesar 0,23 persen. Sedangkan angka kecacatan terkecil terdapat di Kabupaten Melawi yaitu 0,10 persen dari total penduduknya.

c) Proporsi Penduduk Miskin Penerima Jaminan Kesehatan

Salah satu indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, jumlah peserta PBI APBD pada akhir tahun 2022 adalah sebanyak 1.704.249 jiwa. Rincian jumlah peserta PBI APBD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.54
Jumlah Peserta PBI
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	Kab. Sambas	177.676
2	Kab. Mempawah	100.597
3	Kab. Sanggau	84.848
4	Kab. Ketapang	198.040
5	Kab. Sintang	157.819
6	Kab. Kapuas Hulu	79.338
7	Kab. Bengkayang	91.446
8	Kab. Landak	215.185
9	Kab. Sekadau	57.908
10	Kab. Melawi	83.475
11	Kab. Kayong Utara	40.250
12	Kab. Kubu Raya	211.861
13	Kota Pontianak	126.831
14	Kota Singkawang	78.975
Jumlah		1.704.249

Sumber : Dinas Sosial Prov. Kalbar Tahun 2022

C. Mobilitas Penduduk

1. Mobilitas Permanen

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional), dengan kata lain migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Migrasi dapat merefleksikan perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, misalnya karena di daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk di sekitarnya dan daerah-daerah lain, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidup.

a) Migrasi Masuk

Angka Migrasi Masuk menunjukkan banyaknya penduduk yang masuk per 1.000 penduduk di suatu Kabupaten/Kota tujuan dalam waktu satu tahun.

Angka Migrasi Masuk di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.55
Angka Migrasi Masuk

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Tengah Tahun 2022	Jumlah Penduduk Datang	Angka Migrasi Masuk
1	Kab. Sambas	640.578	3.914	6,11
2	Kab. Mempawah	308.640	3.718	12,05
3	Kab. Sanggau	490.607	3.865	7,88
4	Kab. Ketapang	575.579	6.241	10,84
5	Kab. Sintang	429.357	3.936	9,17
6	Kab. Kapuas Hulu	263.090	2.377	9,03
7	Kab. Bengkayang	290.464	3.262	11,23
8	Kab. Landak	405.156	3.640	8,98
9	Kab. Sekadau	216.260	2.046	9,46
10	Kab. Melawi	209.673	2.440	11,64
11	Kab. Kayong Utara	128.415	1.483	11,55
12	Kab. Kubu Raya	611.223	13.072	21,39
13	Kota Pontianak	673.129	12.150	18,05
14	Kota Singkawang	239.875	4.882	20,35
Jumlah		5.482.046	67.026	12,23

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

b) Migrasi Keluar

Angka Migrasi Keluar menunjukkan banyaknya penduduk yang keluar per 1.000 penduduk di suatu kabupaten/Kota asal dalam waktu satu tahun.

Angka Migrasi Keluar di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.56
Angka Migrasi Keluar

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Tengah Tahun 2022	Jumlah Penduduk Keluar	Angka Migrasi Keluar
1	Kab. Sambas	640.578	5.066	7,91
2	Kab. Mempawah	308.640	4.110	13,32
3	Kab. Sanggau	490.607	4.277	8,72
4	Kab. Ketapang	575.579	4.847	8,42
5	Kab. Sintang	429.357	4.226	9,84
6	Kab. Kapuas Hulu	263.090	1.932	7,34
7	Kab. Bengkayang	290.464	3.535	12,17
8	Kab. Landak	405.156	4.699	11,60
9	Kab. Sekadau	216.260	1.939	8,97

10	Kab. Melawi	209.673	2.891	13,79
11	Kab. Kayong Utara	128.415	1.855	14,45
12	Kab. Kubu Raya	611.223	9.784	16,01
13	Kota Pontianak	673.129	13.923	20,68
14	Kota Singkawang	239.875	3.837	16,00
Jumlah		5.482.046	66.921	12,21

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

c) Migrasi Neto

Angka Migrasi Neto merupakan selisih antara migrasi masuk dan keluar. Apabila migrasi masuk lebih besar daripada migrasi keluar maka disebut migrasi neto positif sedangkan jika migrasi keluar lebih besar daripada migrasi masuk disebut migrasi neto negatif.

Angka Migrasi Neto di Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.57
Angka Migrasi Neto

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Tengah Tahun 2022	Jumlah Penduduk Datang	Jumlah Penduduk Keluar	Angka Migrasi Neto
1	Kab. Sambas	640.578	3.914	5.066	-1,80
2	Kab. Mempawah	308.640	3.718	4.110	-1,27
3	Kab. Sanggau	490.607	3.865	4.277	-0,84
4	Kab. Ketapang	575.579	6.241	4.847	2,42
5	Kab. Sintang	429.357	3.936	4.226	-0,68
6	Kab. Kapuas Hulu	263.090	2.377	1.932	1,69
7	Kab. Bengkayang	290.464	3.262	3.535	-0,94
8	Kab. Landak	405.156	3.640	4.699	-2,61
9	Kab. Sekadau	216.260	2.046	1.939	0,49
10	Kab. Melawi	209.673	2.440	2.891	-2,15
11	Kab. Kayong Utara	128.415	1.483	1.855	-2,90
12	Kab. Kubu Raya	611.223	13.072	9.784	5,38
13	Kota Pontianak	673.129	12.150	13.923	-2,63
14	Kota Singkawang	239.875	4.882	3.837	4,36
Jumlah		5.482.046	67.026	66.921	0,02

**Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar**

d) Migrasi Bruto

Migrasi Bruto adalah angka yang menunjukkan banyaknya perpindahan yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar dibagi jumlah penduduk daerah asal dan penduduk daerah tujuan dalam satu tahun.

2. Mobilitas Non Permanen

Mobilitas non permanen atau mobilitas sirkuler adalah gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan untuk menetap. Biasanya dianggap sebagai penduduk musiman atau penduduk pendatang atau penduduk sementara di Kabupaten/Kota.

Mobilitas penduduk non permanen dapat didefinisikan sebagai gerak penduduk yang melintas batas provinsi atau kabupaten menuju provinsi atau kabupaten lain dalam jangka waktu kurang dari enam bulan. Hal ini sesuai dengan paradigma geografis yang didasarkan atas konsep ruang (space) dan waktu (time). Data mobilitas penduduk sirkuler ini sulit didapat karena para pelaku mobilitas sirkuler tidak memberitahu kepergian mereka kepada kantor desa di daerah asal, begitu juga dengan kedatangan mereka di daerah tujuan.

3. Urbanisasi

Konsentrasi penduduk diperkotaan adalah peningkatan frekuensi pertumbuhan penduduk migrasi desa ke kota ditambah pertumbuhan penduduk alamiah di perkotaan.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan dan implikasi pertumbuhan daerah kota untuk masing-masing provinsi perlu dibahas secara mendalam. Jumlah desa yang mengalami reklasifikasi dengan klasifikasi kepadatan penduduk lebih dari 5.000 jiwa /km²; kurang dari 25% rumah tangga bekerja di sektor pertanian; sedikitnya memiliki 8 fasilitas perkotaan.

a) Persentase Penduduk Kota

Angka Persentase Penduduk Kota merupakan konsentrasi penduduk kota dibandingkan dengan total jumlah penduduk keseluruhan dari suatu daerah.

Untuk Provinsi Kalimantan Barat jumlah penduduk kota pada tahun 2022 adalah sebanyak 913.727 jiwa sedangkan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 sebanyak 5.497.151 jiwa sehingga persentase penduduk kota untuk Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 16,62%.

b) Rasio Kota dan Desa

Angka Rasio Kota dan Desa merupakan proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tinggal di desa. Untuk Provinsi Kalimantan Barat jumlah penduduk kota pada tahun 2022 adalah sebanyak 913.727 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang tinggal di desa sebanyak 4.583.424 jiwa.

Dari informasi jumlah penduduk di atas maka angka rasio kota dan desa adalah sebesar 19,94%.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Menurut Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi biodata kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL), Surat Keterangan Kependudukan, dan Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen kependudukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 59 ayat (1) di atas. Tertib administrasi kependudukan lahir dari kelengkapan dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk.

Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum mengikat secara perdata bagi pemilikinya. Kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari instansi pemerintah dan non pemerintah. Bagi pemerintah, di samping untuk mempermudah memberikan pelayanan juga dalam rangka untuk melibatkan penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan, data penduduk diperlukan untuk mempermudah penyusunan perencanaan pembangunan, melibatkan penduduk dalam pembangunan demokrasi, untuk mempermudah alokasi anggaran pemerintah, serta untuk mempermudah penemuan identitas penduduk yang mengalami musibah dan mempermudah mengetahui alamat pelaku kriminalitas.

A. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan,

status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.

Informasi dalam KK dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, karena itu informasi dalam KK harus diperbaiki sesuai perubahan yang dialami oleh pemilik KK tersebut. Jumlah penduduk Kalimantan Barat yang telah memiliki KK sampai dengan akhir tahun 2022 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.1
Kepemilikan Kartu Keluarga Penduduk Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Keluarga Yang Memiliki Kk	% Kepemilikan Kk
1	Kab. Sambas	195.086	11,57%
2	Kab. Mempawah	91.737	5,44%
3	Kab. Sanggau	150.065	8,90%
4	Kab. Ketapang	187.117	11,10%
5	Kab. Sintang	136.775	8,11%
6	Kab. Kapuas Hulu	87.042	5,16%
7	Kab. Bengkayang	84.145	4,99%
8	Kab. Landak	116.099	6,89%
9	Kab. Sekadau	66.584	3,95%
10	Kab. Melawi	66.460	3,94%
11	Kab. Kayong Utara	39.436	2,34%
12	Kab. Kubu Raya	188.037	11,16%
13	Kota Pontianak	204.053	12,11%
14	Kota Singkawang	73.015	4,33%
Jumlah		1.685.651	100%

*Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar*

B. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk

Setelah diberlakukannya Peraturan Presiden No.112 Tahun 2013 tentang Perubahan Masa Berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka terhitung sejak 1 Januari 2015 KTP yang berlaku adalah KTP elektronik (KTP-el) yang berarti KTP konvensional sudah tidak berlaku lagi. KTP-el sangat erat kaitannya

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor KTP yang akan mengantarkan penduduk untuk memiliki identitas tunggal, sebagaimana jargon yang diusung sejak awal program KTP-el adalah 1 (satu) KTP 1 (satu) Identitas atau pada dunia internasional dikenal dengan istilah *Single Identity Number (SIN)*. Program KTP-el ini dimulai tahun 2011 melalui perekaman data diri kependudukan beserta biometriknya meliputi sidik jari dan iris mata, sehingga dapat dipastikan ketunggalannya.

Kepemilikan KTP-el dan persentase penduduk wajib KTP-el Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan akhir tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Persentase Penduduk Wajib KTP-el Dan Data Perekaman KTP-el
Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Wajib KTP	Perekaman	Belum Rekam	Persentase
1	Kab. Sambas	640.838	460.489	432.844	27.645	94,00
2	Kab. Mempawah	308.771	225.960	192.956	33.004	85,39
3	Kab. Sanggau	490.805	363.290	319.605	43.685	87,98
4	Kab. Ketapang	575.817	423.116	360.650	62.466	85,24
5	Kab. Sintang	433.614	311.252	300.628	10.624	96,59
6	Kab. Kapuas Hulu	266.651	194.049	189.911	4.138	97,87
7	Kab. Bengkayang	290.588	208.963	177.140	31.823	84,77
8	Kab. Landak	405.320	288.137	268.500	19.637	93,18
9	Kab. Sekadau	217.468	157.796	152.725	5.071	96,79
10	Kab. Melawi	209.958	151.981	144.444	7.537	95,04
11	Kab. Kayong Utara	128.684	92.923	82.759	10.164	89,06
12	Kab. Kubu Raya	614.910	434.472	422.859	11.613	97,33
13	Kota Pontianak	673.400	491.044	468.319	22.725	95,37
14	Kota Singkawang	240.327	170.355	163.614	6.741	96,04
TOTAL		5.497.151	3.973.827	3.676.954	296.873	92,53

Sumber : Data SIAK Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester II Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 3.973.827 jiwa, yang telah melakukan perekaman KTP-el sebanyak 3.676.954 jiwa (92,53 %) yang belum melakukan perekaman KTP-el sebanyak 296.873 jiwa (7,47 %).

C. Kepemilikan Akta

Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen kependudukan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum perdata mengikat dan melindungi pemilikinya.

Akta Pencatatan Sipil terdiri dari antara lain Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak.

1. Akta Kelahiran

Pencatatan Kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang pertama kali dimiliki oleh seseorang sejak dia dilahirkan. Akta Kelahiran merupakan bukti autentik mengenai asal usul seorang anak. Oleh karena itu, Akta Kelahiran menjadi rujukan utama terhadap identitas seseorang.

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa setiap kelahiran dalam waktu paling lambat 60 hari sejak kelahiran wajib segera dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pencatatan kelahiran dilakukan melalui tiga jenis pencatatan, yaitu (1) anak pasangan suami isteri; (2) anak seorang ibu dan (3) anak yang tidak diketahui asal usulnya.

Data di bawah ini menunjukkan jumlah kelahiran yang dilaporkan ke Instansi Pelaksana dan dicatat dalam Register Akta Kelahiran serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya.

Tabel 5.3
Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kab. Sambas	16.637	18.462	32.444
Kab. Mempawah	4.342	4.108	8.053
Kab. Sanggau	12.263	10.795	17.079
Kab. Ketapang	4.939	1.759	15.875
Kab. Sintang	8.810	8.481	12.189
Kab. Kapuas Hulu	8.134	7.594	12.120
Kab. Bengkayang	4.873	5.444	10.402
Kab. Landak	10.723	12.329	13.263
Kab. Sekadau	6.945	5.253	6.491
Kab. Melawi	5.693	4.294	5.467
Kab. Kayong Utara	2.092	1.741	3.007
Kab. Kubu Raya	13.474	11.437	18.574
Kota Pontianak	7.787	7.684	15.762
Kota Singkawang	3.939	2.811	6.223
Jumlah	110.651	102.192	176.949

*Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tahun 2020-2022
Diolah SIAK Dinas Dukcapil Tahun 2022*

2. Akta Perkawinan

Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan.

Tabel 5.4 menunjukkan jumlah perkawinan yang dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam Register Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya.

Tabel 5.4
Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kab. Sambas	5.328	2.330	309
Kab. Mempawah	2.513	1.045	1.032
Kab. Sanggau	3.267	1.620	2.843
Kab. Ketapang	4.693	2.441	1.056
Kab. Sintang	2.728	1.234	1.206
Kab. Kapuas Hulu	2.498	1.457	969
Kab. Bengkayang	1.356	622	659
Kab. Landak	1.274	865	1.465
Kab. Sekadau	1.519	622	1.160
Kab. Melawi	1.608	753	858
Kab. Kayong Utara	1.229	623	39
Kab. Kubu Raya	5.973	2.920	784
Kota Pontianak	7.183	3.710	982
Kota Singkawang	2.534	1.475	758
Jumlah	43.703	21.717	14.120

*Sumber : Data SIAK Dinas Dukcapil Prov.Kalbar Semester II Tahun 2020-2022
 Diolah Dinas Dukcapil Kab/Kota Tahun 2022*

3. Akta Perceraian

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil wajib mencatatnya dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang masing-masing diberikan kepada suami dan istri yang bercerai. Dengan diterbitkannya Akta Perceraian, maka Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan dicabut.

Tabel 5.5
Jumlah Penerbitan Akta Perceraian Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Perceraian		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kab. Sambas	1.017	528	23
Kab. Mempawah	341	176	14
Kab. Sanggau	274	159	30
Kab. Ketapang	714	438	29
Kab. Sintang	475	336	22
Kab. Kapuas Hulu	155	128	14
Kab. Bengkayang	156	128	19
Kab. Landak	252	239	18
Kab. Sekadau	52	50	11
Kab. Melawi	111	84	8
Kab. Kayong Utara	109	94	1
Kab. Kubu Raya	601	312	38
Kota Pontianak	1.109	704	125
Kota Singkawang	380	325	60
Jumlah	5.746	3.701	412

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Tahun 2020-2022.
Diolah Dinas Dukcapil Tahun 2022

4. Akta Kematian

Pencatatan kematian merupakan dokumen kependudukan yang terakhir kali diterbitkan ketika seseorang meninggal dunia. Berkaitan dengan data kependudukan Akta Kematian menjadi penting, karena menjadi faktor pengurang jumlah penduduk. Selain itu Akta Kematian juga menjadi bukti autentik kematian seseorang.

Data di bawah ini menunjukkan jumlah kematian yang dilaporkan ke Instansi Pelaksana dan dicatat dalam Register Akta Kematian serta diterbitkan Kutipan Akta Kematian.

Tabel 5.6
Jumlah Penerbitan Akta Kematian Kabupaten/Kota
Di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Akta Kematian		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Kab. Sambas	1.165	4.705	5.285
Kab. Mempawah	619	1.910	1.958
Kab. Sanggau	2.284	977	2.335
Kab. Ketapang	1.853	6.561	2.795
Kab. Sintang	1.577	1.727	2.197
Kab. Kapuas Hulu	479	1.281	1.923
Kab. Bengkayang	348	384	1.023
Kab. Landak	791	1.073	1.071
Kab. Sekadau	203	293	582
Kab. Melawi	823	654	772
Kab. Kayong Utara	357	1.241	1.370
Kab. Kubu Raya	1.491	2.372	2.599
Kota Pontianak	4.275	5.871	5.141
Kota Singkawang	705	1.160	1.382
Jumlah	1.165	4.705	30.433

Sumber : Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Tahun Tahun 2022, diolah

5. Akta Pengakuan Anak

Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah biologis terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Sehingga pengakuan anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak, sehingga dengan pengakuan anak dimaksud maka anak yang bersangkutan mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya.

Akta Pengakuan Anak ini penting, karena sebagaimana diketahui bahwa anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, maka dalam

Akta Kelahiran hanya dicatat sebagai anak dari seorang ibu. Dengan adanya pengakuan anak ini, maka secara hukum anak tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, artinya anak tersebut memiliki hak dan kewajiban terhadap ayah biologisnya, dan demikian pula sebaliknya.

Pengesahan anak yaitu pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, dengan penjelasan pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah dengan pemberian akta pengesahan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk data pengakuan anak dan pengesahan anak, belum bisa di tampilkan karena pencatatan dan pelaporannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten/Kota sampai proses penyusunan selesai belum diterima dikarenakan masih dilaksanakan secara manual dan membuat keterlambatan Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan.

D. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar

Surat Keterangan Orang Terlantar adalah identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan kepada orang terlantar yang telah didata. Namun angka kepemilikan surat keterangan orang terlantar tidak dapat ditampilkan dikarenakan fitur keterangan surat orang terlantar tidak terdapat didalam aplikasi SIAK.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat bertujuan untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang mengamanatkan bahwa profil perkembangan kependudukan dilakukan setiap tahun anggaran.

Profil perkembangan kependudukan menggambarkan kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022. Data yang tertuang dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, diantaranya menyusun perencanaan di bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta untuk keperluan lainnya yang diinginkan unit kerja.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kelemahan, baik karena kemampuan tim penyusun maupun kelemahan data yang diperoleh dan ditampilkan. Untuk itu tim penyusun tetap terbuka untuk menerima kritik, saran serta masukan demi kebaikan dalam penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun selanjutnya.

Akhirnya kepada semua pihak diucapkan terima kasih semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua, Aamiin.